



ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA **PETERNAKAN** NUSA TENGGARA TIMUR

HASIL SURVEI RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN
TAHUN 2014



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA **PETERNAKAN** NUSA TENGGARA TIMUR

HASIL SURVEI RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN
TAHUN 2014



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ANALISIS RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN DI NTT

HASIL SURVEI RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN 2014

© 2015 : Badan Pusat Statistik
ISBN : 978-602-6786-27-2
Nomor Publikasi : 52553.1507
Katalog BPS : 5301006.53
Naskah : Bidang Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur

Tim Penyusun
Pengarah : Anggoro Dwitjahyono
Penanggung Jawab : Sofan
Editor : Sofan
Penulis : Heri Drajat Raharja, Sari Ayutyas
Desain Cover : Sari Ayutyas
Desain Layout : Sari Ayutyas, Dewi K. Ayuningtyas, Sonia T. Amabi

Kupang : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015
X + 69 halaman: 17,6 x 25 cm

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Dalam rangka analisis ST2013, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mempublikasikan 2 (dua) buku Analisis Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013), yaitu : Analisis Potensi Pertanian Nusa Tenggara Timur dan Analisis Sosial Ekonomi Petani di Nusa Tenggara Timur. Kedua publikasi tersebut merupakan Analisis Hasil Pencacahan Lengkap (ST2013-L) dan Survei Pendapatan Petani (SPP2013).

Untuk melengkapi hasil analisis dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai subsektor pertanian, disusunlah buku analisis subsektor pertanian yaitu Analisis Profil Rumah Tangga Usaha Peternakan. Publikasi ini berisi analisis hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (STU) 2014, yang bertujuan untuk menggali lebih dalam keadaan sosial ekonomi rumah tangga usaha peternakan, menggambarkan intensitas dan penggunaan faktor produksi dan menggambarkan kinerja usahanya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan ST2013 hingga tersusunnya buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna.

Kupang, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Anggoro Dwitjahyono

Kata Pengantar



Daftar Isi

Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	V
Daftar Tabel	VII
Daftar Gambar	VIII
Daftar Lampiran	X
BAB 1 PERAN SUBSEKTOR PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN NTT	3
Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB Sektor Pertanian dan PDRB NTT	4
BAB 2 KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN	8
Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan	9
Sebaran Rumah Tangga Peternakan	10
Berbagai Macam Ternak yang Dibudidayakan RTU Peternakan di NTT	11
Karakteristik Peternak 3 Komoditi Unggulan NTT	12
BAB 3 PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG	17
Penyebaran RTU Peternakan Sapi Potong di NTT	17
Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Sapi Potong	19
Lama Kegiatan Usaha Peternakan Sapi Potong	20
Asal Ternak Sapi Potong	21
Struktur Ongkos dan Produksi	22
Akses Sumber Daya Produktif	23
Kelayakan Usaha Rumah Tangga Peternakan Sapi Potong	26

Daftar Isi

BAB 4	PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN BABI	26
	Penyebaran RTU Peternakan Babi di NTT	30
	Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Babi	31
	Lama Kegiatan Usaha dan Asal Ternak Babi	32
	Asal Ternak Babi	33
	Struktur Ongkos dan Produksi	34
	Akses Sumber Daya Produktif	35
BAB 5	PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN KAMBING	39
	Penyebaran RTU Peternakan Kambing di NTT	40
	Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Kambing	41
	Lama Kegiatan Usaha dan Asal Ternak Kambing	42
	Asal Ternak Kambing	43
	Struktur Ongkos dan Produksi	44
	Akses Sumber Daya Produktif	45
BAB 6	KESIMPULAN	49
	LAMPIRAN	54
	KONSEP DAN DEFINISI	67

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah RTU Sapi Potong Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014	18
Tabel 3.2	Stuktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Sapi Potong Per Ekor/Tahun, 2014	23
Tabel 3.3	Persentase RTU Sapi Potong Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014	24
Tabel 3.4	Persentase RTU Sapi Potong Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014	25
Tabel 4.1	Jumlah RTU Babi Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014	30
Tabel 4.2	Stuktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Babi Per Ekor/Tahun, 2014	34
Tabel 4.3	Persentase RTU Babi Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014	35
Tabel 4.4	Persentase RTU Babi Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014	36
Tabel 5.1	Jumlah RTU Kambing Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014	40
Tabel 5.2	Stuktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Kambing Per Ekor/Tahun, 2014	44
Tabel 5.3	Persentase RTU Kambing Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014	45
Tabel 5.4	Persentase RTU Kambing Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014	46

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kontribusi PDRB Subsektor Peternakan terhadap PDRB Pertanian dan PDRB NTT (persen), 2004 dan 2014	4
Gambar 1.2	Perkembangan Peranan Subsektor Peternakan Terhadap Sektor Pertanian PDRB NTT (persen), 2004—2014	5
Gambar 2.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan 2003 dan 2013	9
Gambar 2.2	Penyebaran Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Pulau di NTT (persen), 2013	10
Gambar 2.3	Penyebaran Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten di NTT (persen), 2013	11
Gambar 2.4	Persentase Jumlah Peternak Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	13
Gambar 2.5	Persentase Jumlah Peternak Menurut Umur Peternak, 2014	14
Gambar 3.1	Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014	19
Gambar 3.2	Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Lamanya Berusaha, 2014	20
Gambar 3.3	Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Asal Ternak, 2014	21
Gambar 4.1	Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014	31
Gambar 4.2	Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Lamanya Berusaha, 2014	32
Gambar 4.3	Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Asal Ternak, 2014	33

Daftar Gambar

Gambar 5.1	Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014	41
Gambar 5.2	Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Lamanya Berusaha, 2014	42
Gambar 5.3	Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Asal Ternak, 2014	43

<https://ntt.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Lampiran 1.1	Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2003 dan 2013	54
Lampiran 1.2	Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten/ Kota dan Beberapa Jenis Ternak, 2013	55
Lampiran 1.3	Persentase Peternak Menurut Jenis Ternak dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014	56
Lampiran 1.4	Persentase Peternak Menurut Jenis Ternak dan Kelompok Umur Peternak, 2014	57
Lampiran 1.5	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Lama Kegiatan Usaha, 2014	58
Lampiran 1.6	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Asal Utama Ternak, 2014	59
Lampiran 1.7	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Perolehan Tambahan Modal dan Sumber Modal, 2014	60
Lampiran 1.8	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Status Keanggotaan Koperasi, dan Alasan Tidak Menjadi Anggota Koperasi, 2014	61
Lampiran 1.9	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Status Keanggotaan Kelompok Peternak, 2014	62
Lampiran 1.10	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Keikutsertaan dalam Bimbingan Penyuluhan Usaha Peternakan, 2014	63
Lampiran 1.11	Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Kegiatan Kemitraan dengan Perusahaan, dan Jenis Badan Hukum Mitra Usaha Utama, 2014	64



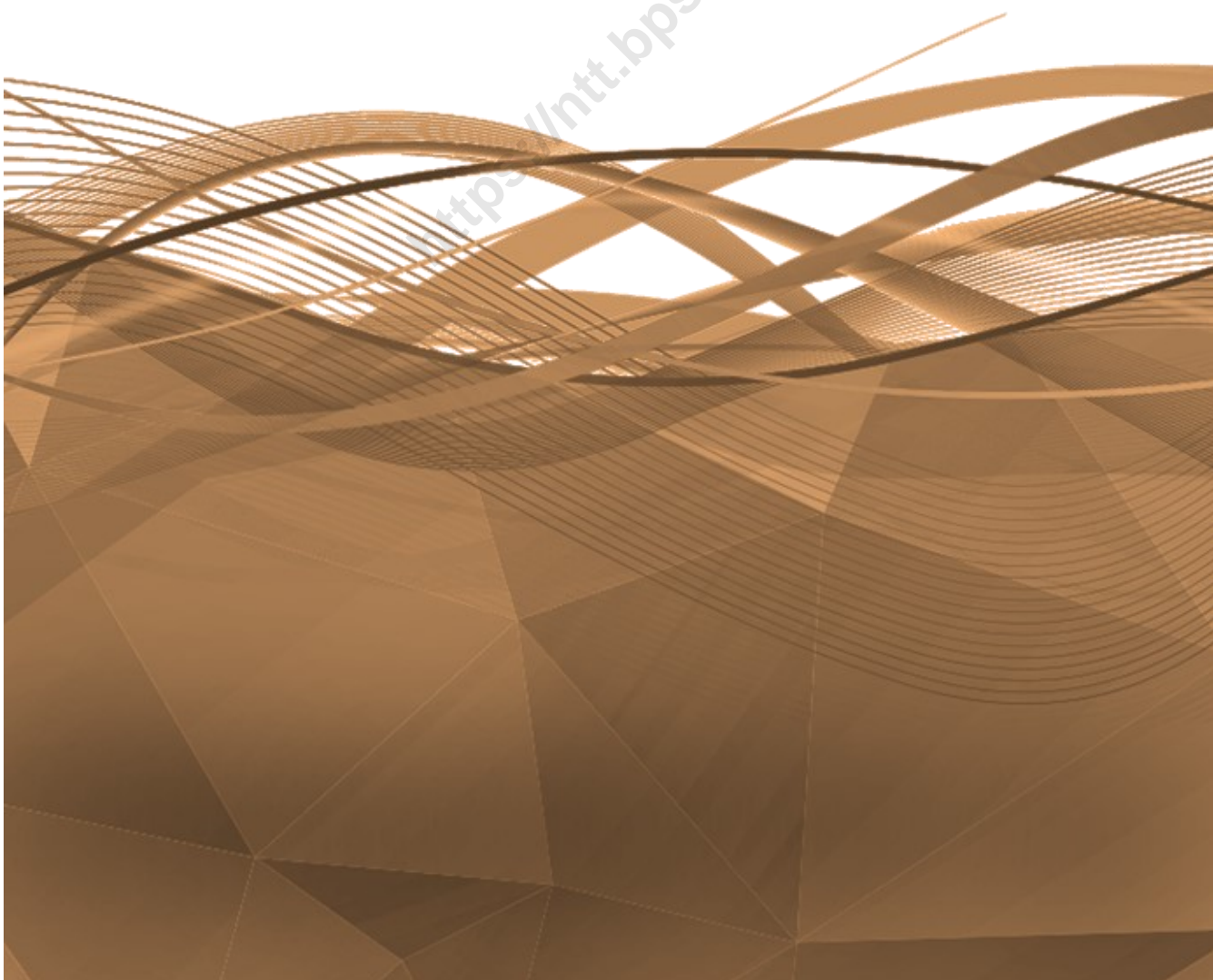
PERAN SUBSEKTOR
PETERNAKAN DALAM
PEREKONOMIAN
NTT



Bab

1

<http://ntt.bps.go.id>



PERAN SUBSEKTOR PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN NTT

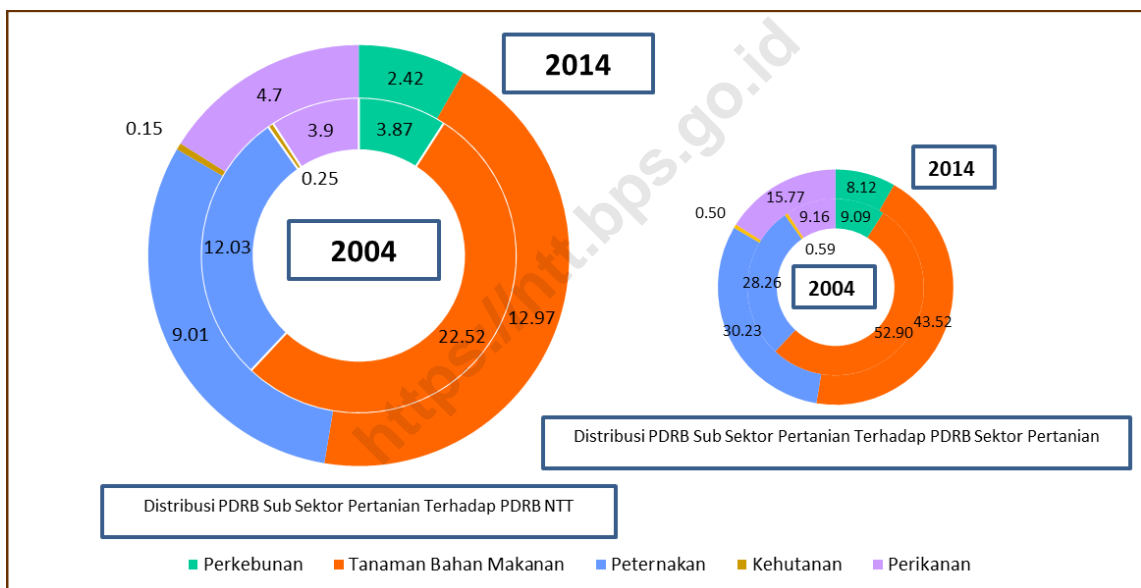
Saat ini pangan merupakan salah satu isu yang sangat strategis. Sektor peternakan merupakan salah satu usaha penopang penyediaan pangan. Ternak dan hasil produksinya mempunyai nilai yang strategis karena merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan asam amino yang seimbang, sehingga sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia adalah dengan meningkatkan konsumsi protein hewani. Komoditas—komoditas ternak seperti daging, telur dan susu telah memberikan andil yang besar untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan bagi perbaikan gizi manusia.

Seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk NTT maka permintaan akan produk—produk ternak juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Perubahan konsumsi masyarakat dari yang semula lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat menjadi lebih banyak protein membuat kebutuhan komoditi peternakan meningkat. Dengan demikian, peran subsektor peternakan menjadi sangat strategis bagi pembangunan manusia di NTT.

Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Sektor Pertanian dan PDRB NTT

Subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis. Selain berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan, subsektor peternakan juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja di NTT. Subsektor peternakan juga berperan dalam menciptakan nilai tambah di sektor pertanian di NTT. Hal ini terlihat dari kontribusi subsektor peternakan pada PDRB Pertanian sekitar 30,23 persen pada tahun 2014 serta kontribusi subsektor peternakan pada PDRB NTT sekitar 9,01 persen pada tahun 2014 (Gambar 1.1).

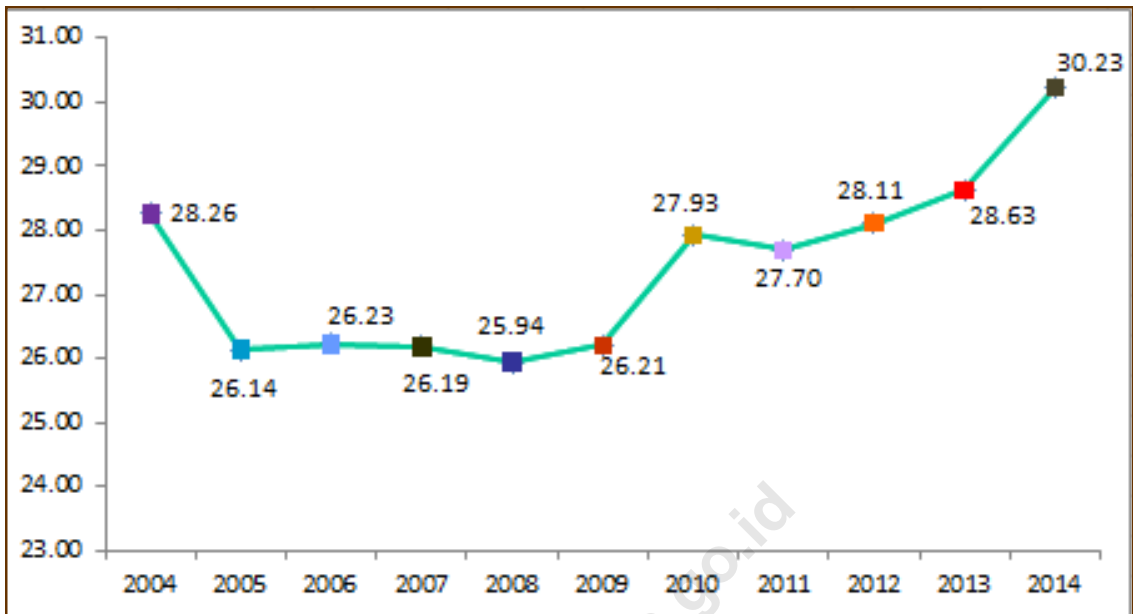
Gambar 1.1 Kontribusi PDRB Subsektor Peternakan terhadap PDRB Pertanian dan PDRB NTT (persen), 2004 dan 2014



Sumber : Publikasi PDRB Sektoral NTT 2004 dan 2014

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kontribusi subsektor peternakan terhadap sektor pertanian ternyata tidak meningkat secara signifikan. Pada tahun 2004 kontribusinya hanya 28,26 persen dan pada tahun 2014 sedikit meningkat menjadi 30,23 persen. Dalam perkembangan selama 10 tahun terakhir, subsektor peternakan memberikan tren peranan yang berfluktuasi namun secara umum meningkat (Gambar 1.2)

Gambar 1.2 Perkembangan Peranan Subsektor Peternakan Terhadap Sektor Pertanian PDRB NTT (persen), 2004—2014



Sumber : Publikasi PDRB Sektoral NTT 2004 dan 2014



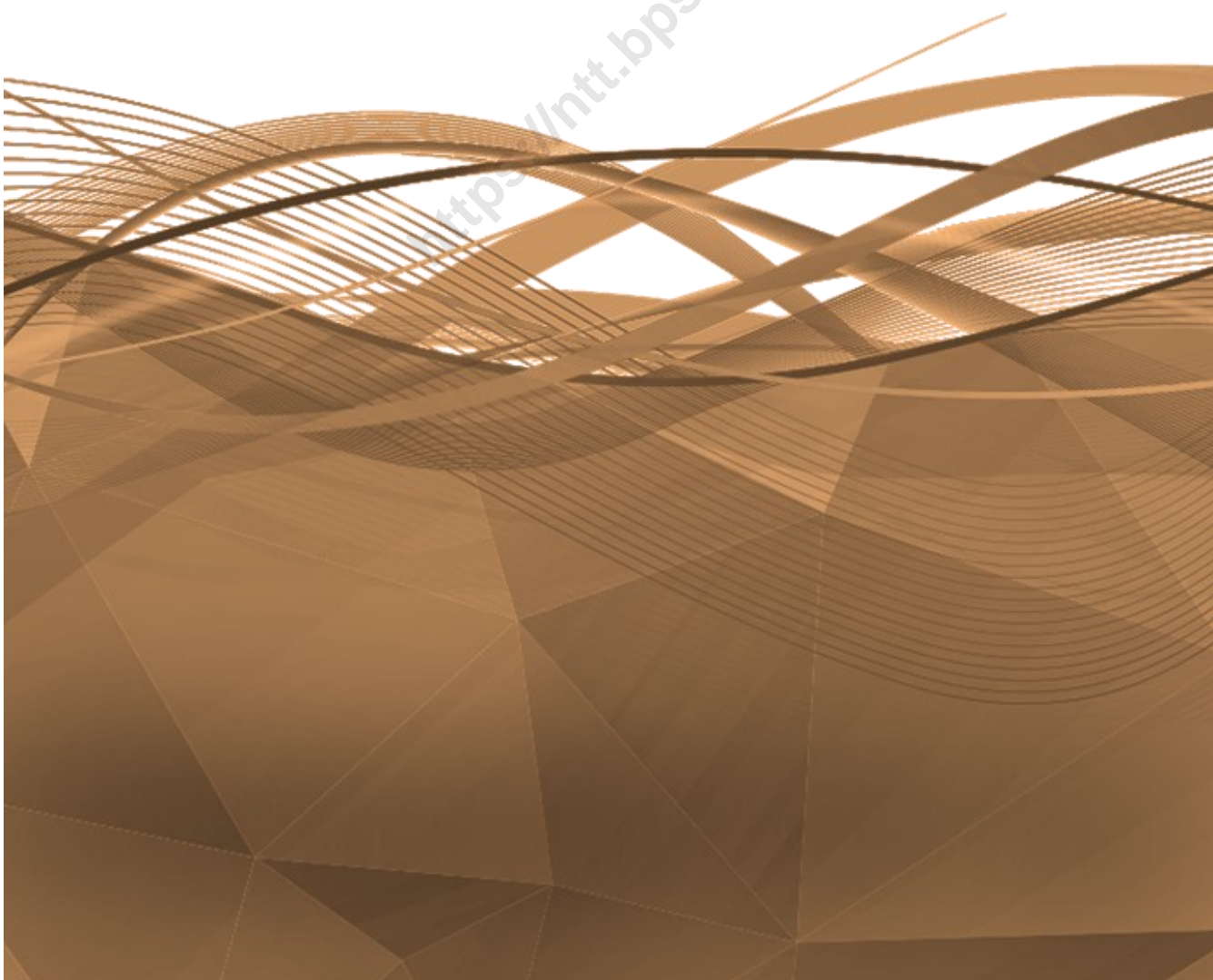
**KARAKTERISTIK
RUMAH TANGGA USAHA
PETERNAKAN**



Bab

2

<http://ntt.bps.go.id>



KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN

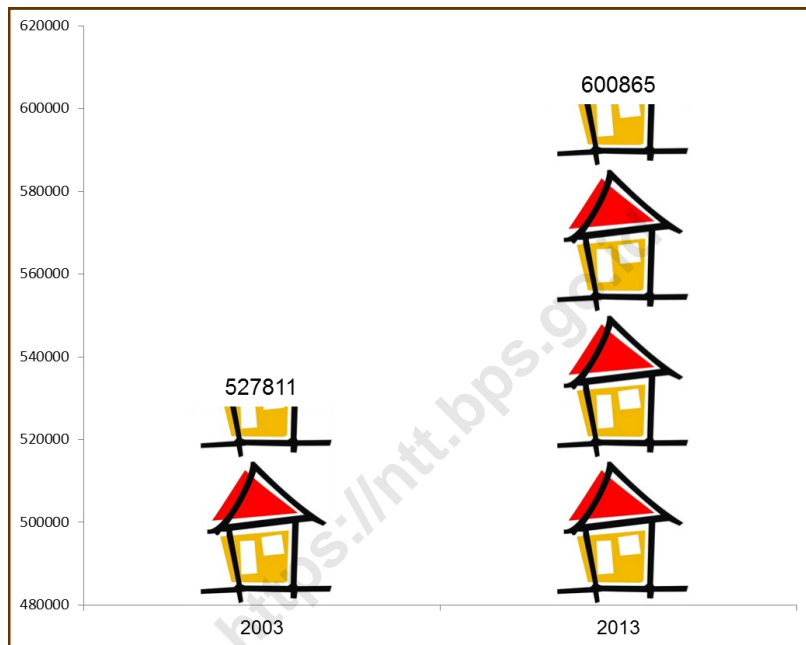
Saat ini, pangan dan energi merupakan isu yang sangat strategis. Sektor peternakan sebagai salah satu penopang penyediaan pangan penduduk, menjadi perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Upaya untuk menata kembali pengelolaan peternakan di NTT terus diupayakan oleh berbagai pihak. Pengelolaan tersebut meliputi pemberdayaan peternakan rakyat dari sisi rumah tangga, dan di sisi lain, memberikan fasilitas bagi pengembangan perusahaan berskala besar, untuk meningkatkan daya saing komoditas ternak NTT.

Di NTT, produksi sektor peternakan masih didominasi oleh usaha peternakan rakyat, yaitu usaha peternakan yang diusahakan oleh rumah tangga. Pada pelaksanaannya, usaha peternakan rakyat ini masih jauh dari prinsip—prinsip bisnis modern. Skala usaha peternakan rakyat ini juga relatif kecil, khususnya untuk ternak besar seperti sapi. Jika pemerintah mempunyai target untuk kemandirian pangan, khususnya swasembada daging sapi maka kebijakan yang mendukung pengelolaan usaha ternak rakyat menjadi hal yang harus dilakukan secara intensif dan terpadu.

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan

Selama periode 10 tahun terakhir, sektor pertanian subsektor peternakan telah mengalami peningkatan jumlah rumah tangga yang mengusahakannya. Selama 2003—2013 jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan telah meningkat sebanyak 73.054 rumah tangga atau 13,84 persen dari 527.811 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 600.865 rumah tangga pada tahun 2013 (sumber: ST2013-L, Gambar 2.1)

Gambar 2.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan 2003 dan 2013



Sumber : ST2013-L, BPS

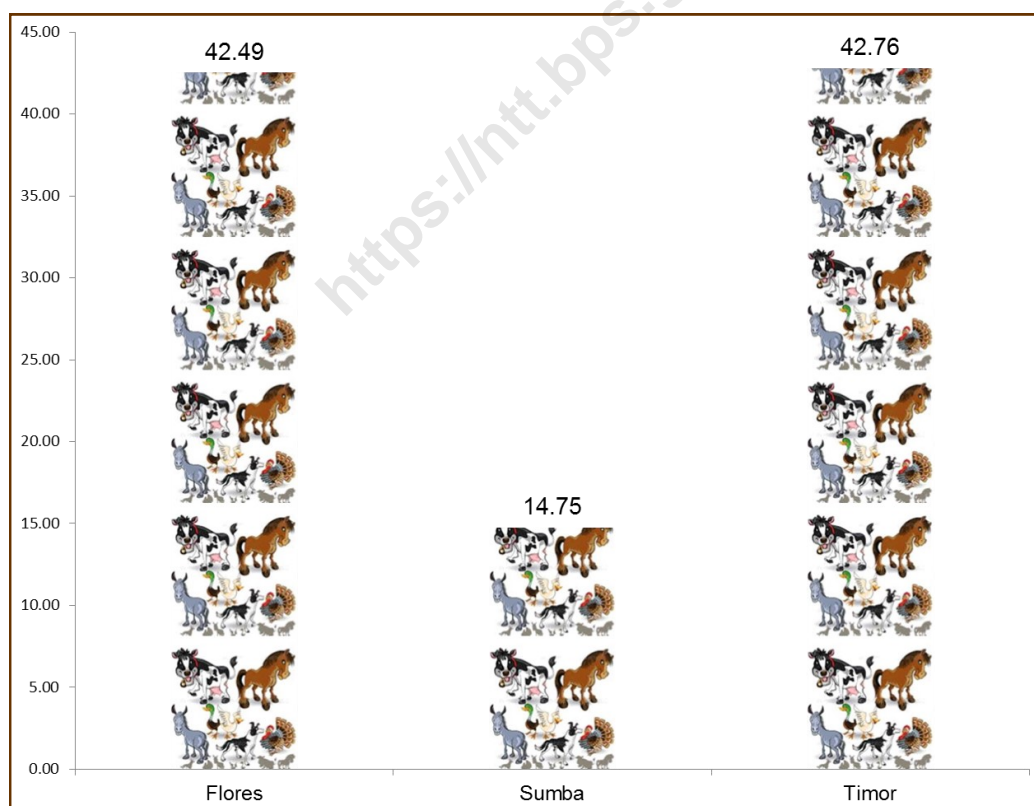
Dengan mengacu data ST2013 ini maka target—target untuk peningkatan produksi daging yang sudah dicanangkan pemerintah dalam rangka menciptakan kemandirian pangan sudah mulai menunjukkan hasil. Untuk mendukung kemandirian pangan dari produk peternakan maka minat masyarakat pada usaha budidaya peternakan harus ditumbuhkan lebih giat lagi. Oleh sebab itu dukungan dari pemerintah dan lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat peternakan. Sejalan dengan komitmen percepatan pembangunan pertanian oleh pemerintah yang kolektif dalam membangun sektor peternakan. Dengan demikian akan terjadi sinergi dan sinkronisasi antara pihak—pihak yang terkait.

Sebaran Rumah Tangga Peternakan

Faktor utama yang mempengaruhi produktivitas ternak adalah genetik dan lingkungan. Faktor genetik menentukan kemampuan produksi, sementara faktor lingkungan akan mendukung kemampuan ternak untuk memproduksi. Faktor lingkungan antara lain adalah pakan, pengelolaan ternak, kandang, penyakit, dan iklim. Setiap jenis ternak mempunyai kekhasan tempat dan iklim yang kondusif untuk berkembang biak. Selain faktor lingkungan antara lain, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, seperti jarak yang dekat dengan pasar dan faktor distribusi yang lebih baik. Kedua faktor tersebut menyebabkan sebaran ternak di NTT dominasinya tidak merata untuk masing—masing ternak.

Secara umum sebaran rumah tangga peternakan NTT masih terpusat di Pulau Timor. Tercatat 42,76 persen berada di Pulau Timor (Gambar 2.2).

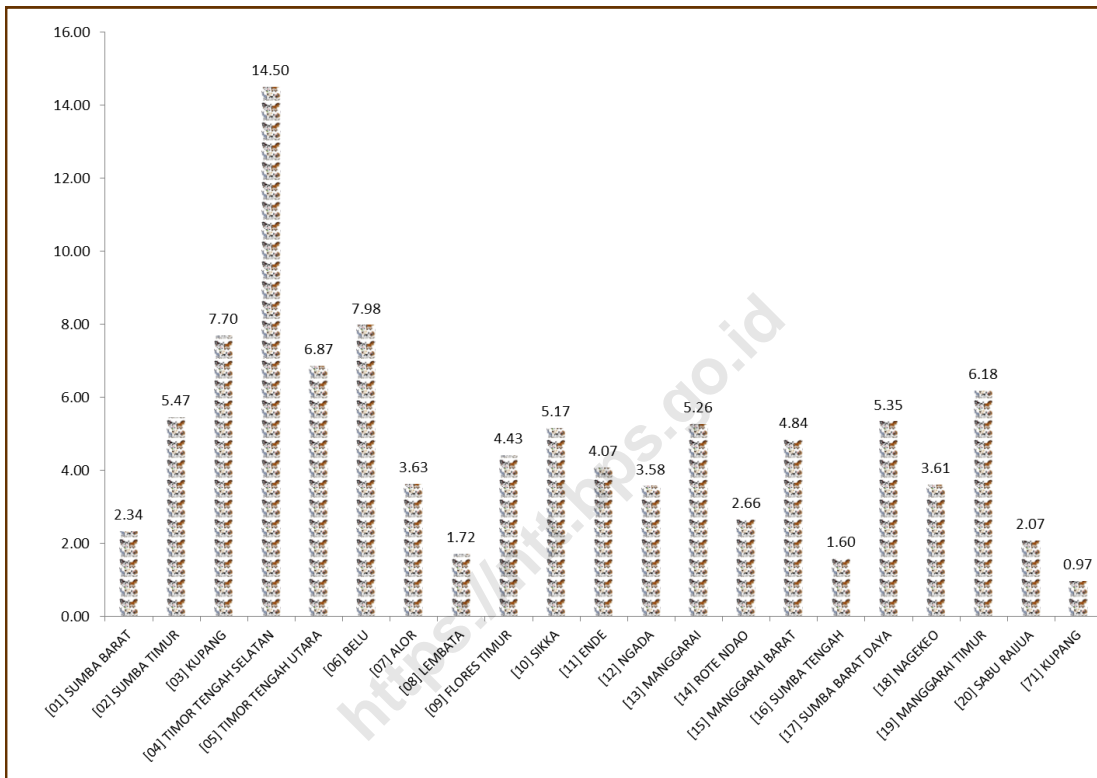
Gambar 2.2 Penyebaran Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Pulau di NTT (persen), 2013



Sumber : ST2013-L, BPS

Wilayah NTT yang memiliki rumah tangga usaha peternakan terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tercatat 14,50 persen RTU Peternakan berada di Kabupaten Tiimor Tengah Selatan, selebihnya menyebar secara merata di kabupaten lain (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Penyebaran Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten di NTT (persen), 2013



Sumber : ST2013-L, BPS

Berbagai Macam Ternak yang Dibudidayakan RTU Peternakan di NTT

Produk—produk peternakan telah menjadi sumber makanan dan protein bagi penduduk NTT. Bagi sebagian masyarakat produk peternakan merupakan komoditas yang cukup mahal, seperti daging sapi dan susu. Namun, seiring dengan peningkatan taraf hidup penduduk NTT, permintaan komoditas peternakan semakin meningkat. Jenis masakan dengan bahan dasar dari berbagai komoditas peternakan telah menjadi menu makanan yang banyak peminatnya. Tidak hanya daging sapi, daging ayam ras, maupun telur sebagai bahan dasar makanan, namun daging itik maupun daging ayam kampung menjadi menu favorit. Dengan ketersediaan berbagai jenis komoditas ternak maka pola makanan di NTT juga beraneka ragam.

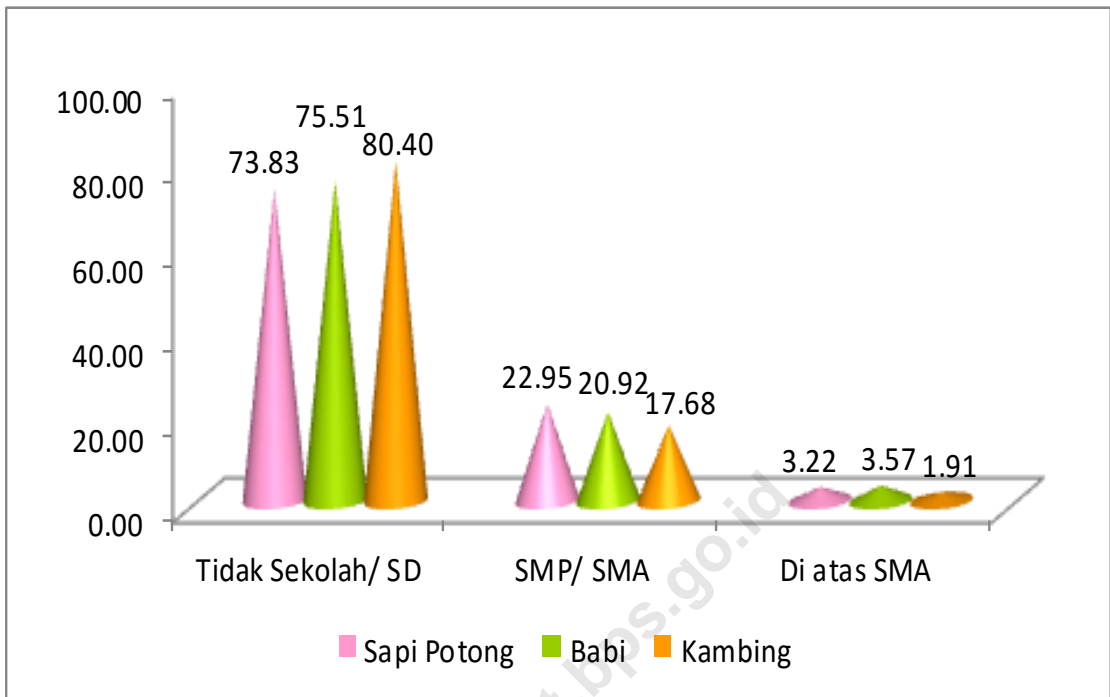
Beberapa jenis ternak besar dan kecil penghasil daging yang banyak dikonsumsi adalah sapi potong, kambing, dan babi. Dari keiga jenis ternak tersebut, daging sapi menjadi paling banyak dikonsumsi. Karena produksi sapi potong dalam negeri yang masih terbatas maka pengembangan usaha peternakan ini telah mendapat perhatian yang serius. Berbagai program sedang dan akan dikembangkan untuk meningkatkan produksi daging sapi dalam rangka memenuhi target swasembada daging sapi pada tahun 2017 (sumber : Renstra Kementan, 2015-2019).

Selaras dengan Renstra Kementan 2015—2019, tentang pengembangan usaha RTU Peternakan penghasil daging yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, jenis ternak yang menjadi komoditas ternak unggulan di NTT adalah Sapi Potong, Babi, dan Kambing. Untuk itu, dalam publikasi ini akan membahas tiga jenis usaha ternak yang komoditasnya menjadi unggulan oleh penduduk NTT, yaitu sapi potong, babi, dan kambing. Selain merupakan komoditi unggulan, alasan lainnya adalah karena produk—produk tersebut merupakan target pemerintah dalam swasembada pangan.

Karakteristik Peternak 3 Komoditi Unggulan (Sapi Potong, Babi, dan Kambing) NTT

Kualitas peternak sangat menentukan kinerja usaha peternakan. Peternak yang berkualitas adalah faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan peternakan. Kualitas peternak dapat dilihat dari aspek pendidikan dan usia. Dari aspek pendidikan, sebagian besar peternak tidak bersekolah atau hanya tamat SD (Gambar 2.4). Peternak yang memiliki pendidikan tertinggi di atas SMA tidak lebih dari 5 persen. Hal ini terjadi di semua RTU Peternakan masing—masing komoditi unggulan. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan watak manusia untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Rendahnya pendidikan akan membatasi peternak dalam menyerap ilmu, serta untuk mengakses teknologi dan berinovasi. Hal ini juga akan menghambat pengembangan skala usaha peternakan. Sehubungan dengan masalah SDM peternak, diperlukan percepatan program peningkatan mutu SDM melalui peningkatan dan perluasan akses pendidikan. Di samping itu, diperlukan upaya peningkatan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan SDM penyuluh pertanian. Selanjutnya diupayakan penguatan kelembagaan pertanian seperti kelompok peternak dan perluasan akses terhadap sumber daya produktif seperti permodalan dan pemasaran.

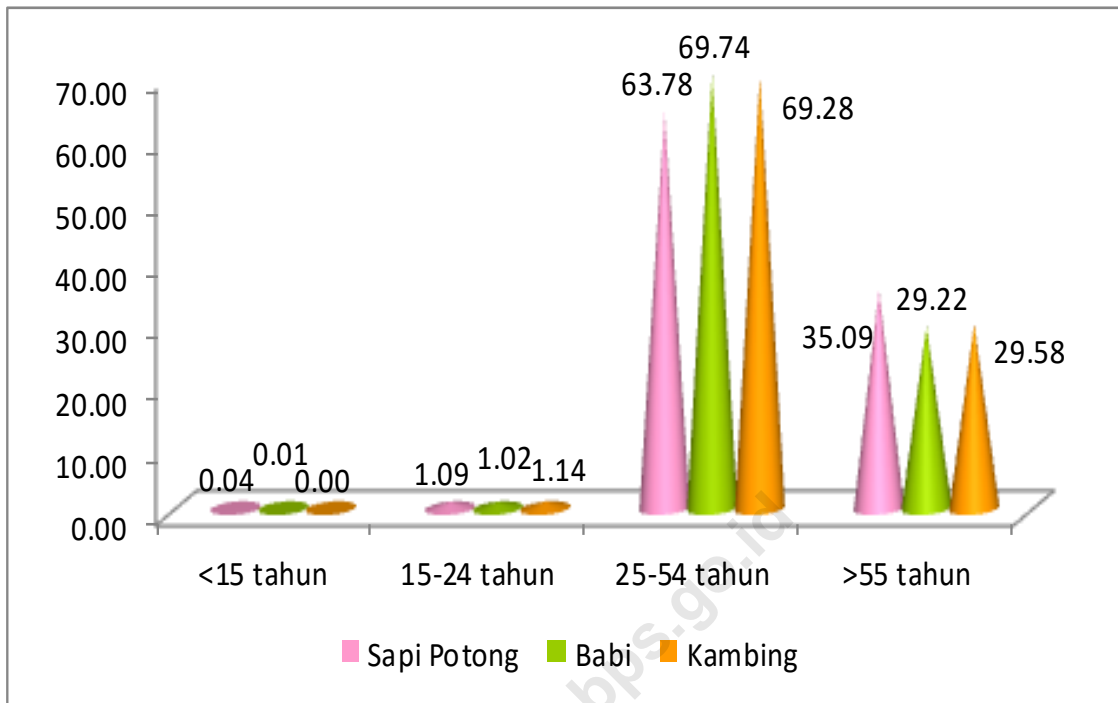
Gambar 2.4 Persentase Jumlah Peternak Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014




Sumber : ST2013-STU,BPS

Umur peternak berpengaruh besar terhadap kinerja usaha peternakan. Usia yang muda cenderung lebih mudah menerima ilmu serta mempunyai inovasi dalam mengembangkan bisnis usaha. Usia peternak di NTT sebagian besar berusia 25—54 tahun (Gambar 2.5). Hal ini mengindikasikan bahwa usaha peternakan cukup diminati atau menjadi pilihan usaha bagi generasi produktif (25—54 tahun). Dilihat dari struktur umur peternak, 60 persen lebih peternak berada di usia produktif, hal ini akan menjadi sebuah nilai tambah dalam kesinambungan usaha peternakan. Oleh karena itu, minat generasi produktif di perdesaan terhadap usaha peternakan harus terus ditingkatkan.

Gambar 2.5 Persentase Jumlah Peternak Menurut Umur Peternak, 2014



Sumber : ST2013-STU,BPS

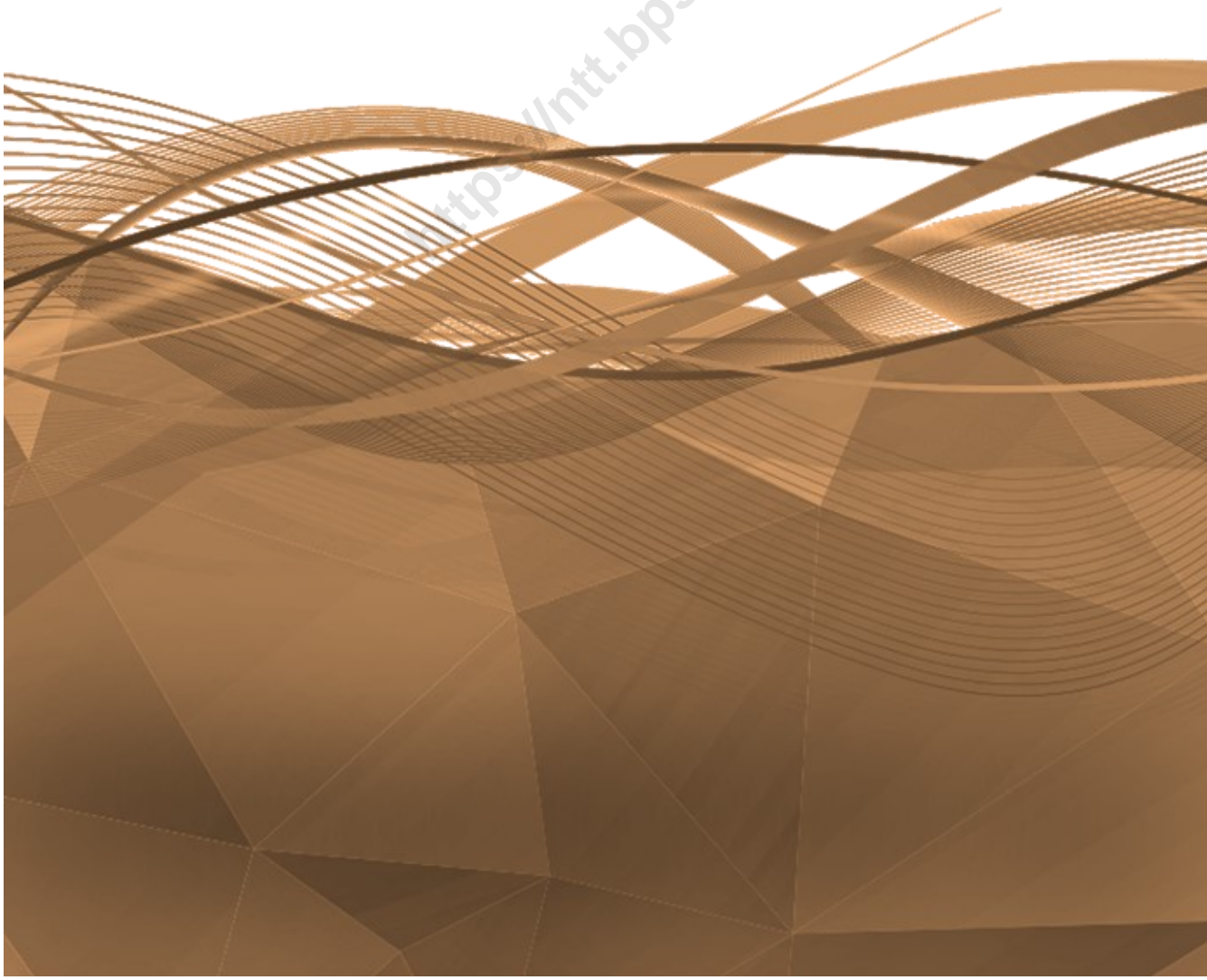


PROFIL
RUMAH TANGGA USAHA
PETERNAKAN
SAPI POTONG

Bab

3

<http://ntt.bps.go.id>



PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG

Wilayah NTT berpotensi untuk usaha perkembangbiakan sapi potong. NTT memiliki banyak padang rumput dan sangat baik bagi perkembangbiakan ternak sapi potong. Namun, rendahnya curah hujan di NTT menyebabkan suplai pakan rumput hijau sangat terbatas pada musim kemarau. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah tentang bagaimana mengatasi kendala—kendala dalam usaha perkembangbiakan sapi potong di NTT yang merupakan salah satu potensi unggulan daerah.

Penyebaran RTU Peternakan Sapi Potong di NTT

Pasokan daging sapi di NTT sebagian besar diperoleh dari usaha rumah tangga peternakan. Sementara jumlah RTU peternakan sapi potong pada tahun 2014 masih terbilang rendah yaitu sebesar 187.398 RTU Peternakan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk NTT tahun 2014 yang besar (5.036.897 jiwa).

Usaha rumah tangga sapi potong telah menyebar ke seluruh NTT, namun penyebarannya masih belum merata. Pulau Timor masih menjadi pusat usaha rumah tangga peternakan sapi potong. Dari sisi jumlah rumah tangga yang mengusahakan, 68,81 persen RTU sapi potong berada di Pulau Timor, 25,78 persen berada di Pulau Flores dan sisanya 5,40 persen berada di Pulau Sumba. Dilihat dari data ini, maka usaha peternakan sapi potong harus dikembangkan juga di wilayah Pulau Sumba dan Pulau Flores. Sebaran rumah tangga usaha peternakan sapi potong di NTT dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah RTU Sapi Potong Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014

	Kabupaten/ Kota	Skala Kecil	Skala Sedang	Skala Besar	Jumlah
01	Sumba Barat	59	0	0	59
02	Sumba Timur	3 006	1 974	4 247	9 227
03	Kupang	6 105	10 886	9 241	26 232
04	Timor Tengah Selatan	17 192	15 220	11 862	44 274
05	Timor Tengah Utara	5 479	12 237	6 986	24 702
06	Belu	7 246	9 769	7 712	24 727
07	Alor	87	26	13	126
08	Lembata	191	1 066	383	1 640
09	Flores Timur	382	225	62	669
10	Sikka	1 717	3 204	289	5 210
11	Ende	5 252	3 904	1 222	10 378
12	Ngada	4 383	3 664	851	8 898
13	Manggarai	4 918	2 048	0	6 966
14	Rote Ndao	661	2 486	3 539	6 686
15	Manggarai Barat	1 213	1 085	512	2 810
16	Sumba Tengah	272	40	166	478
17	Sumba Barat Daya	306	18	34	358
18	Nagekeo	3 063	2 994	941	6 998
19	Manggarai Timur	1 812	1 947	866	4 625
20	Sabu Raijua	366	329	197	892
71	Kota Kupang	628	579	236	1 443
NUSA TENGGARA TIMUR		64 338	73 701	49 359	187 398

Sumber : ST2013-L,BPS

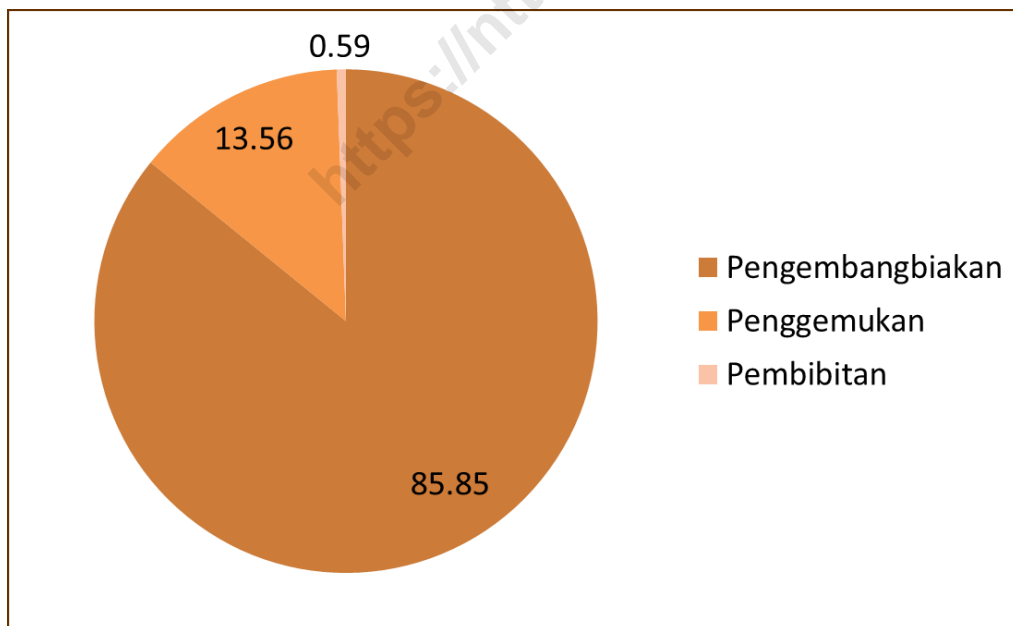
Wilayah yang memiliki jumlah RTU Sapi Potong terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, disusul Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Sementara, wilayah yang memiliki RTU Sapi Potong terendah berada di Kabupaten Sumba Barat. Berdasarkan skala usaha yang dimiliki, RTU Sapi Potong di NTT terbanyak berada di skala sedang (3-9 ekor) yaitu sebesar 73.701 RTU Sapi Potong, untuk skala besar (> 10 ekor) hanya sebesar 49.359 RTU Sapi Potong, dan untuk skala kecil (1-2 ekor) sebesar 64.338 RTU Sapi Potong.

Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Sapi Potong

Usaha peternakan sapi potong pada umumnya merupakan usaha dengan tujuan utama melakukan pengembangbiakan sapi potong dengan memperbanyak anakan. Persentase usaha ini mencapai 85,85 persen. Sementara usaha RTU dengan tujuan penggemukan, yaitu hanya membeli bakalan sapi kemudian melakukan budidaya tanpa melakukan pengembangbiakan hanya 13,56 persen. Usaha pengembangbiakan sapi dianggap lebih menguntungkan karena persentasenya paling besar (Gambar 3.1).

Sementara itu usaha sapi potong yang tujuan utamanya pembibitan hanya kurang dari 1 persen. Padahal saat ini permintaan akan bibit sapi potong lebih tinggi dari produksinya. Usaha pembibitan sapi kurang menarik bagi pengusaha maupun peternak karena memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk menghasilkan bakalan sapi. Saat ini belum adanya lembaga yang khusus menangani pembibitan sehingga pasokan bibit sapi lokal hanya mengandalkan peternak atau melakukan impor.

Gambar 3.1 Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014

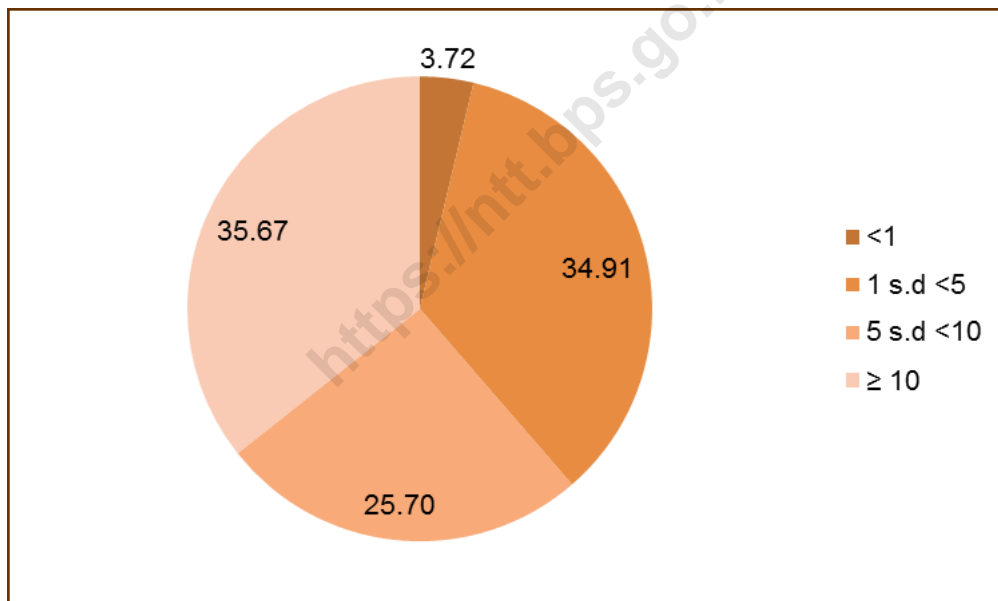


Sumber : ST2013-STU.S

Lama Kegiatan Usaha Peternakan Sapi Potong

Sebagian besar usaha rumah tangga peternakan sapi potong di NTT dilakukan dalam skala sedang dan rentang waktu lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, rata—rata lama usaha peternakan sapi potong diatas 5 tahun , dengan persentase RTU lebih dari 70 persen. Sedangkan yang sudah melakukan usaha lebih dari 10 tahun mencapai 35,67 persen (Gambar 3.2). Lama beternak menunjukkan pengalaman RTU dalam mengelola sapi potong. Semakin lama usaha dilakukan memberikan indikasi bahwa peternak akan mempunyai pengetahuan, keterampilan yang baik dalam pengelolaan usaha sapi potong. Namun disisi lain, bisa menjadi tidak efisien karena pengelolaannya mengikuti kebiasaan—kebiasaan lama yang cenderung semi-ekstensif dan merupakan turun—temurun dari orang tuanya.

Gambar 3.2 Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Lamanya Berusaha, 2014



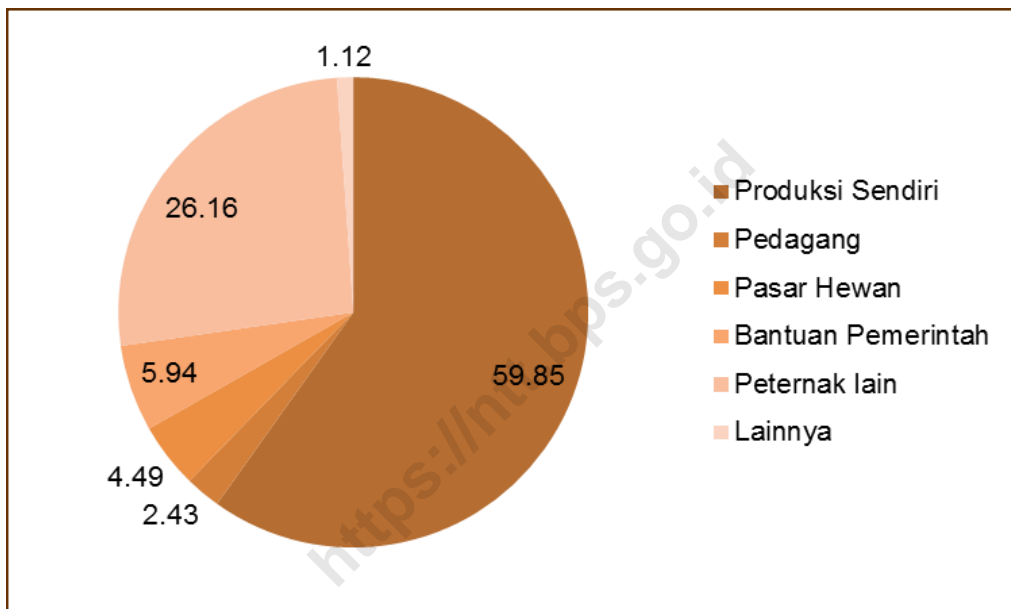
Sumber : ST2013-STU.S

Sementara itu, persentase RTU sapi potong yang melakukan usaha baru hanya sekitar 3,72 persen (RTU Sapi Potong yang lama usahanya kurang dari 1 tahun). Hal ini menunjukkan kurangnya minat rumah tangga untuk mengusahakan peternakan sapi potong.

Asal Ternak Sapi Potong

Dalam rangka pengembangan usaha ternak sapi potong, RTU peternakan sapi umumnya akan melakukan penambahan ternak, baik dari pengembangbiakan sendiri maupun dari pembelian. Data ST2013 menunjukkan bahwa RTU sapi potong lebih banyak yang melakukan produksi sendiri (59,85 persen) dibandingkan yang melakukan pembelian ternak dari pedagang sapi (2,43 persen).

Gambar 3.3 Persentase RTU Peternakan Sapi Potong Menurut Asal Ternak, 2014



Sumber : ST2013-STU.S

Pada gambar 3.3 juga menunjukkan jumlah RTU yang mendapat bantuan dari pemerintah dalam pengadaan sapi potong jumlahnya kecil, hanya sebesar 5,94 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani sapi potong di NTT sudah mempunyai kemandirian dalam pengembangbiakan usahanya. Namun demikian, bagi peternak skala kecil, diharapkan lebih banyak dukungan dari pemerintah, khususnya dalam pengadaan sapi potong.

Struktur Ongkos dan Produksi

Setiap kegiatan usaha membutuhkan faktor—faktor produksi untuk menghasilkan output yang optimal. Dalam usaha peternakan, faktor—faktor produksi meliputi lahan, bibit, pakan, obat, energi, dan lain—lain. Biaya—biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi menggambarkan struktur ongkos dari usaha peternakan sapi potong. Dalam prakteknya, biaya—biaya tersebut banyak yang tidak dikeluarkan oleh peternak, seperti biaya untuk pakan dan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengeluaran dibedakan menjadi riil dan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran riil adalah pengeluaran input yang benar—benar dikeluarkan oleh peternak. Sementara pengeluaran seharusnya termasuk imputasi untuk biaya yang tidak dikeluarkan oleh peternak.

Dalam satu tahun, pengeluaran untuk mengusahakan 1 ekor sapi potong sebesar 1,36 juta rupiah. Namun, secara riil biaya yang dikeluarkan peternak hanya sekitar 695 ribu rupiah. Dalam pengelolaan usaha sapi potong banyak biaya produksi yang secara riil tidak dikeluarkan oleh petani antara lain pakan dan tenaga kerja. Pengeluaran terbesar digunakan untuk pakan yang mencapai 64,32 persen yaitu sebesar 876 ribu rupiah, tetapi secara riil biaya untuk penggunaan pakan hanya sekitar 2,86 persen yaitu sebesar 2 ribu rupiah. Biaya produksi yang cukup tinggi berikutnya adalah biaya tenaga kerja yaitu sebesar 398 ribu rupiah, namun karena banyak menggunakan pekerja keluarga maka biaya riil hanya sebesar 14 ribu rupiah (Tabel 3.2).

Dari Tabel 3.2, nilai produksi perekor pertahun usaha ternak sapi potong mencapai 1,81 juta rupiah. Jika dinilai dengan biaya produksi imputasi sebesar 1,36 juta rupiah per ekor/tahun, keuntungan peternak sangat minim.

Tabel 3.2 Struktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Sapi Potong Per Ekor/Tahun, 2014

Keterangan	Seharusnya		Riil	
	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran	1 363,01	100	69,57	100
Upah Tenaga Kerja	398,01	29,24	14,57	20,95
Pakan	876,62	64,32	2	2,86
Bahan Bakar	2,60	0,19	2,60	3,74
Listrik	1,31	0,10	1,31	1,88
Air	11,09	0,81	0,55	0,80
Pemeliharaan	33,74	2,48	22,76	32,72
Lain—Lain	39,05	2,86	25,78	37,05
Produksi	1 806,67			

Sumber : ST2013-STU.S

Akses Sumber Daya Produktif

Untuk meningkatkan produktivitas produk pertanian maka akses terhadap sumber daya produktif harus dipermudah dan perlu mendapat fasilitas yang baik dari Pemerintah. Sumber daya produktif meliputi modal, kelembagaan, penyuluhan, serta pemasaran. Modal merupakan unsur yang sangat esensial dalam mendukung peningkatan produksi.

Pemerintah melalui UU No.19 Tahun 2013 telah mencetuskan kebijakan penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai salah satu strategi pemberdayaan petani. Demikian pula dengan peternak, aspek permodalan menjadi salah satu aspek yang sangat mendasar. Untuk mengembangkan usahanya, peternak sapi potong akan memerlukan tambahan modal yang cukup besar, khususnya dari lembaga keuangan seperti Bank atau Koperasi. Namun, dari hasil ST2013, sebagian besar RTU peternakan sapi potong mengaku tidak mendapatkan tambahan modal, yaitu mencapai 93 persen. Hanya 7 persen saja yang mendapatkan tambahan modal. Alasan RTU sapi potong tidak menambah modal beragam. Alasan yang cukup banyak dikemukakan oleh peternak adalah tidak berminat dan tidak ada pemberi bantuan modal (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Persentase RTU Sapi Potong Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014

	Uraian	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
	Tidak mendapatkan tambahan modal	93,21
	Tidak mampu membayar bunga	9,84
	Tidak memiliki agunan	2,65
	Lokasi Bank/ Koperasi terlalu jauh	2,37
	Tidak ada pemberi bantuan modal	37,77
	Tidak berminat	45,07
	Lainnya	2,30
	Mendapat tambahan modal	6,79

Sumber : ST2013-STU.S

Selain modal, aspek penting lainnya adalah kelembagaan. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ekonomi kelembagaan telah menjadi perhatian, demikian pula dengan kelembagaan peternakan. Penguatan kelembagaan peternak seperti kelompok peternak, gapoktan, dan koperasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha peternakan. Melalui kelompok peternak dapat dibangun kegiatan kolektif untuk menunjang usaha peternakan, seperti penyuluhan. Disamping itu, kerjasama kemitraan harus didorong untuk membangun sinergi antara perusahaan dengan peternak seperti pengadaan sarana produksi, budidaya, peningkatan, kualitas, penanganan pascapanen, dan pemasaran hasil.

Terkait dengan kelembagaan pertanian, sebagian besar RTU peternakan sapi potong tidak memiliki akses terhadap kelembagaan tersebut. Data ST2013 menunjukkan hanya 13,15 persen RTU sapi potong yang menjadi anggota koperasi (Tabel 3.4). Alasan sebagian besar RTU tidak menjadi anggota koperasi karena belum ada koperasi di wilayah desanya, yang mencapai 59,29 persen dari RTU sapi potong. Demikian pula dengan keanggotaan kelompok ternak, hanya 13,41 persen RTU sapi potong yang menjadi anggota kelompok ternak. Alasannya adalah tidak terdapat kelompok ternak di wilayahnya dengan persentase 48,70 persen. Sedangkan 44,87 persen RTU sapi potong menyatakan tidak berminat.

Tabel 3.4 Persentase RTU Sapi Potong Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014

Kelembagaan	Persentase (%)
(1)	(2)
Keanggotaan koperasi	13,15
Keanggotaan kelompok ternak	13,41
Penyuluhan	12,50
Menjadi mitra usaha	0,46

Sumber : ST2013-STU.S

Dengan minimnya keanggotaan kelompok ternak maka RTU sapi potong juga minim mendapatkan penyuluhan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Terlihat dari persentase RTU sapi potong yang mendapat penyuluhan hanya 12,50 persen (Tabel 3.4). Alasan tidak mendapatkan penyuluhan karena tidak ada penyuluhan di wilayah desanya. Kegiatan penyuluhan ini sangat fundamental bagi pengelolaan usaha ternak sapi karena peternak akan mendapatkan ilmu untuk berinovasi dalam pengelolaan usaha ternaknya. Hal ini harus menjadi perhatian yang besar bagi Pemerintah, jika ingin meningkatkan produktivitas usaha sapi potong maka harus dibuka seluas—luasnya akses pada kelembagaan.

Aspek penting dalam kelembagaan pertanian adalah keanggotaan terhadap asosiasi peternak. Bagi RTU sapi potong yang bakal usahanya relatif kecil, keanggotaan terhadap asosiasi peternak sepertinya masih sangat asing. Anggota asosiasi ternak cenderung dilakukan oleh pengusaha besar maupun perusahaan ternak sangat besar khususnya sebagai mediasi dan fasilitasi program pemerintah kepada peternak.

Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha pertanian adalah melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan besar atau BUMN/ BUMD. Manfaat bermitra bagi RTU adalah meningkatkan usahanya dengan tujuan komersial dan yang berorientasi pasar, dengan memanfaatkan kepedulian dari pihak swasta/BUMN. Perusahaan akan membantu menanggulangi kendala—kendala usaha yang ada. Namun sepertinya usaha kemitraan ini belum dilakukan sepenuhnya oleh RTU sapi potong. Hanya kurang dari 1 persen RTU sapi potong yang bermitra dengan perusahaan/ BUMN (Tabel 3.4).

Kelayakan Usaha Rumah Tangga Peternakan Sapi Potong

Salah satu cara untuk mengukur kinerja usaha adalah dengan mengukur kelayakan usahanya. Kelayakan usaha dapat dilihat dari beberapa cara, salah satunya dapat dilihat dari struktur biaya input dan nilai outputnya. Usaha dilakukan layak jika nilai outputnya mampu menutup seluruh biaya input. Atau dengan kata lain, tidak rugi atau minimal impas. Ukuran tersebut yang digunakan adalah RC Ratio (*Revenue Cost Ratio*), yaitu merupakan rasio antara penerimaan produksi dan total biaya input. Pada usaha peternakan sapi potong biaya input meliputi biaya—biaya pemeliharaan seperti pakan, tenaga kerja, vaksinasi, obat—obatan, inseminasi buatan, bahan bakar, dan lain—lain. Sementara nilai produksi merupakan nilai penjualan sapi maupun produksi ikutannya.

Dengan metode RC Rasio, akan diperoleh informasi apakah usaha peternakan sapi potong layak atau tidak. Namun demikian, RC rasio tidak sepenuhnya menggambarkan keuntungan dari usaha peternakan. Diperlukan beberapa data lain seperti pembelian lebih dari satu tahun pada periode pencacahan. Namun, sebagai indikasi kelayakan usaha, nilai RC rasio dapat digunakan sebagai indikator. Penjelasan mengenai RC rasio adalah: jika nilainya kurang dari satu, usaha tersebut merugi; jika RC rasio sama dengan satu, usaha tersebut tidak menghasilkan apa—apa atau impas; dan jika RC rasio lebih dari satu, usaha tersebut telah menguntungkan.

Dari penghitungan RC Rasio usaha rumah tangga ternak sapi potong di NTT, menghasilkan nilai rasio sebesar 5,71. Artinya nilai produksi usaha ini lebih dari 5 kali lipat dari biaya produksinya selama setahun. Angka RC Rasio usaha sapi potong yang cukup besar tidak semata—mata menunjukkan keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi usaha sapi potong akibat tidak dikeluarkannya biaya pakan dan tenaga kerja untuk sebagian besar usaha sapi potong.

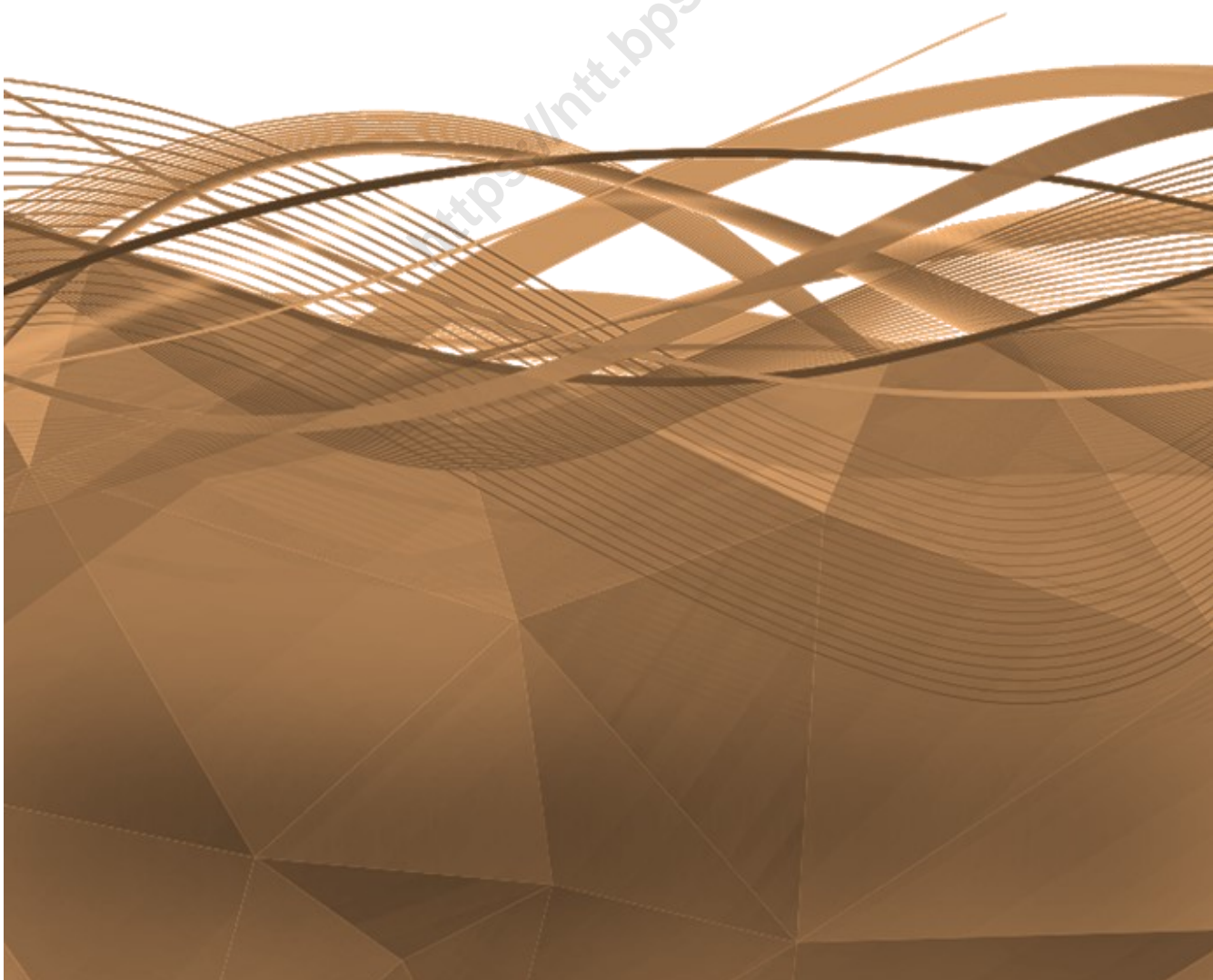


PROFIL
RUMAH TANGGA USAHA
PETERNAKAN
BABI

Bab

4

<http://ntt.bps.go.id>



PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN BABI

Babi merupakan salah satu sumber protein hewani yang dapat diperoleh dengan mudah di NTT, karena selain daging sapi, daging babi merupakan daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat NTT. RTU Peternakan Babi dirasa memiliki nilai cukup efisien, karena selain pertumbuhan badannya yang cepat, dari segi pakan RTU Peternakan Babi mampu memanfaatkan segala jenis limbah pertanian, tidak membutuhkan lahan pemeliharaan yang luas, sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kebanyakan masyarakat NTT mengkonsumsi daging babi, sehingga kendala keterbatasan konsumen dalam pengembangan pemasaran daging babi tidak cukup signifikan. Jika potensi RTU Peternakan Babi ini dimanfaatkan dengan baik dan sistem pemeliharaan sudah memadai maka potensi RTU Peternakan Babi di NTT dapat berkembang dengan pesat.

Babi merupakan salah satu komoditas ternak penghasil daging. Babi memiliki sifat—sifat dan kemampuan yang menguntungkan antara lain adalah memiliki laju pertumbuhan yang cukup cepat dan juga memiliki jumlah anak per kelahiran (litter size) yang tinggi. Sehingga, jika dilihat dari kelebihan—kelebihannya tersebut maka babi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penghasil daging.

Penyebaran RTU Peternakan Babi di NTT

Usaha rumah tangga babi tersebar secara merata di kabupaten/ kota di NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten yang memiliki RTU Babi terbesar di NTT, disusul Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Flores Timur (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Jumlah RTU Babi Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014

	Kabupaten/ Kota	Skala Kecil	Skala Sedang	Skala Besar	Jumlah
01	Sumba Barat	6 821	3 218	311	10 350
02	Sumba Timur	10 754	7 206	349	18 309
03	Kupang	4 580	2 973	174	7 727
04	Timor Tengah Selatan	16 016	13 172	1 269	30 457
05	Timor Tengah Utara	6 133	3 250	318	9 701
06	Belu	4 134	5 647	378	10 159
07	Alor	4 260	7 200	469	11 929
08	Lembata	1 296	2 086	151	3 533
09	Flores Timur	11 226	10 381	364	21 971
10	Sikka	10 711	9 070	393	20 174
11	Ende	5 702	2 421	432	8 555
12	Ngada	6 474	4 021	203	10 698
13	Manggarai	13 031	1 538	115	14 684
14	Rote Ndao	2 141	2 047	410	4 598
15	Manggarai Barat	9 981	2 416	159	12 556
16	Sumba Tengah	2 583	1 485	28	4 096
17	Sumba Barat Daya	13 232	7 024	801	21 057
18	Nagekeo	4 379	4 601	76	9 056
19	Manggarai Timur	13 415	8 120	655	22 190
20	Sabu Raijua	3 070	3 184	244	6 498
71	Kota Kupang	2 980	676	95	3 751
NUSA TENGGARA TIMUR		152 919	101 736	7 394	262 049

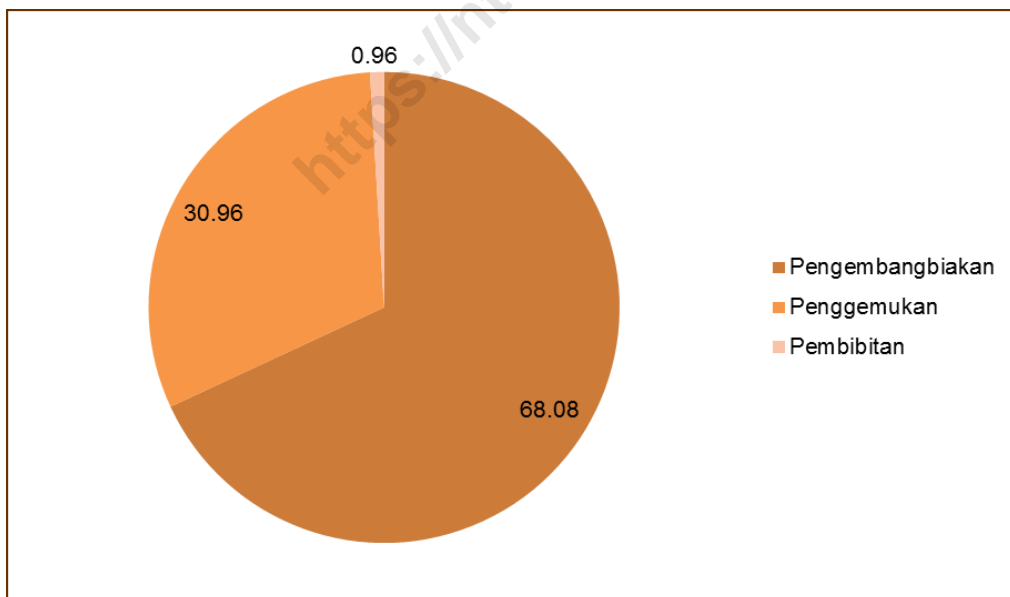
Sumber : ST2013-L,BPS

Wilayah yang memiliki jumlah RTU Babi terendah berada di Kabupaten Lembata, kemudian disusul Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Tengah. Berdasarkan skala usaha yang dimiliki, RTU Babi di NTT terbanyak berada di skala kecil (1-2 ekor) yaitu sebesar 152.919 RTU Babi, untuk skala sedang (3-9 ekor) hanya sebesar 101.736 RTU Babi, dan untuk skala besar (>10 ekor) sebesar 7.394 RTU Babi.

Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Babi

Usaha peternakan babi pada umumnya merupakan usaha dengan tujuan utama melakukan pengembangbiakan babi dengan memperbanyak anakan. Persentase usaha ini mencapai 68,08 persen. Sementara usaha RTU dengan tujuan penggemukan, yaitu hanya membeli bakalan babi kemudian melakukan budidaya tanpa melakukan pengembangbiakan hanya 30,96 persen. Usaha pengembangbiakan babi dianggap lebih menguntungkan karena persentasenya paling besar. Sementara itu usaha babi yang tujuan utamanya pembibitan hanya kurang dari 1 persen, yaitu sebesar 0,96 persen. (Gambar 4.1).

Gambar 4.1 Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014

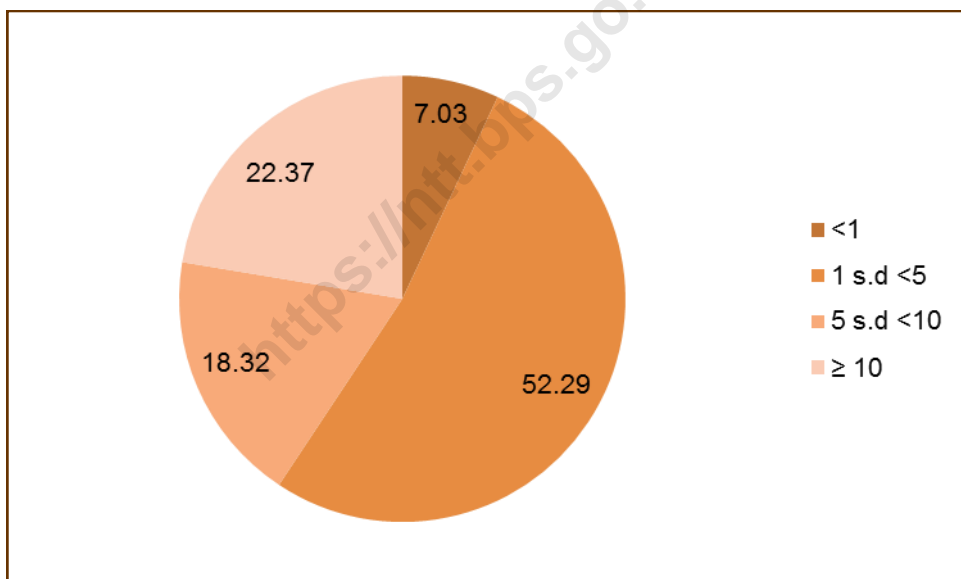


Sumber : ST2013-STU.S

Lama Kegiatan Usaha Peternakan Babi

Sebagian besar usaha rumah tangga peternakan Babi di NTT dilakukan dalam skala kecil dan rentang waktu 1 s.d < 5 tahun. Pada saat ini, rata—rata lama usaha peternakan babi di bawah 5 tahun, dengan persentase RTU hampir 60 persen. Sedangkan yang sudah melakukan usaha lebih dari 10 tahun mencapai 22,37 persen (Gambar 4.2). Rentang pemeliharaan babi tidak memakan waktu lama, karena siklus reproduksi babi yang pendek memungkinkan pertumbuhan babi juga menjadi cepat, sehingga banyak RTU Peternakan yang memilih beternak babi untuk periode singkat. Hal ini menunjukkan cukup berminatnya rumah tangga baru untuk mengusahakan peternakan babi.

Gambar 4.2 Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Lamanya Berusaha, 2014

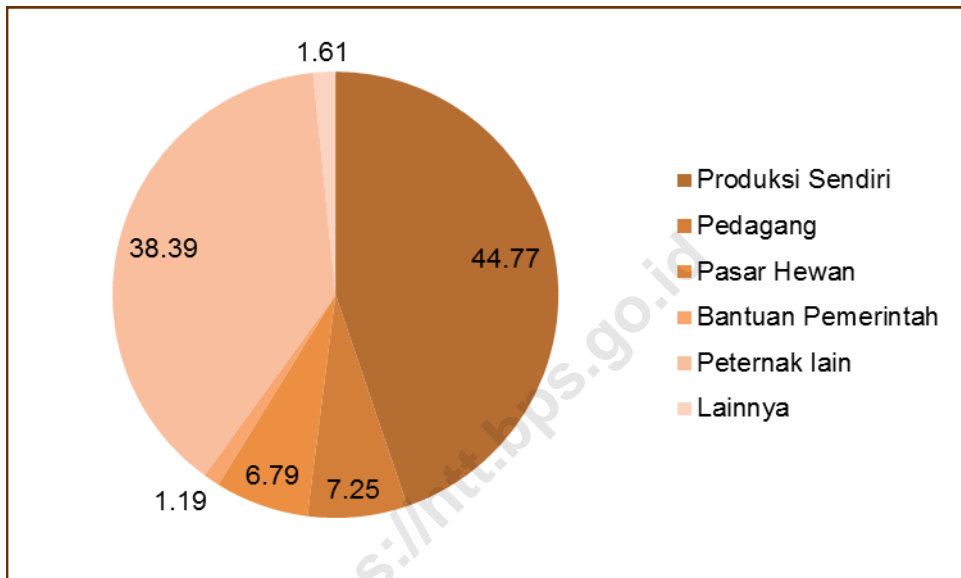


Sumber : ST2013-STU.S

Asal Ternak Babi

Dalam rangka pengembangan usaha ternak babi, RTU peternakan babi umumnya akan melakukan penambahan ternak, baik dari pengembangbiakan sendiri maupun dari pembelian. Data ST2013 menunjukkan bahwa RTU babi lebih banyak yang melakukan produksi sendiri (44,77 persen) dibandingkan yang melakukan pembelian ternak dari pedagang babi (7,25 persen).

Gambar 4.3 Persentase RTU Peternakan Babi Menurut Asal Ternak, 2014



Sumber : ST2013-STU.S

Pada gambar 4.3 juga menunjukkan jumlah RTU yang mendapat bantuan dari pemerintah dalam pengadaan babi jumlahnya kecil, hanya sebesar 1,19 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani babi di NTT sudah mempunyai kemandirian dalam pengembangbiakan usahanya. Namun demikian, bagi peternak skala kecil, diharapkan lebih banyak dukungan dari pemerintah, khususnya dalam pengadaan babi.

Struktur Ongkos dan Produksi

Dalam satu tahun, pengeluaran untuk mengusahakan 1 ekor babi sebesar 474 ribu rupiah. Namun, secara riil biaya yang dikeluarkan peternak hanya sekitar 86 ribu rupiah. Dalam pengelolaan usaha babi banyak biaya produksi yang secara riil tidak dikeluarkan oleh petani antara lain pakan dan tenaga kerja. Pengeluaran terbesar digunakan untuk pakan yang mencapai 48,47 persen yaitu sebesar 230 ribu rupiah, tetapi secara riil biaya untuk penggunaan pakan sekitar 65,86 persen yaitu sebesar 57 ribu rupiah. Biaya produksi yang cukup tinggi berikutnya adalah biaya tenaga kerja yaitu 183 ribu rupiah, namun karena banyak menggunakan pekerja keluarga maka biaya riil tidak lebih dari seribu rupiah (Tabel 4.2).

Dari Tabel 4.2, nilai produksi perekor pertahun usaha ternak babi mencapai 866 ribu rupiah. Jika dinilai dengan biaya produksi imputasi sebesar 474 ribu rupiah per ekor/tahun, keuntungan peternak adalah kurang dari 50 persen.

Tabel 4.2 Struktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Babi Per Ekor/Tahun, 2014

Keterangan	Seharusnya		Riil	
	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran	474,06	100	86,90	100
Upah Tenaga Kerja	183,44	38,69	0,97	1,11
Pakan	229,77	48,47	57,24	65,86
Bahan Bakar	8,35	1,76	4,71	5,42
Listrik	1,19	0,25	1,16	1,34
Air	10,80	2,28	1,83	2,11
Pemeliharaan	6,82	1,44	5,59	6,43
Lain—Lain	33,69	7,11	15,40	17,73
Produksi	866,89			

Sumber : ST2013-STU.S

Akses Sumber Daya Produktif

Dari hasil ST2013, sebagian besar RTU peternakan babi mengaku tidak mendapatkan tambahan modal, yaitu mencapai 95 persen. Hanya 5 persen saja yang mendapatkan tambahan modal. Alasan RTU babi tidak menambah modal beragam. Alasan yang cukup banyak dikemukakan oleh peternak adalah tidak berminat dan tidak ada pemberi bantuan modal (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Persentase RTU Babi Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014

	Uraian	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
	Tidak mendapatkan tambahan modal	95,32
	Tidak mampu membayar bunga	15,27
	Tidak memiliki agunan	7,80
	Lokasi Bank/ Koperasi terlalu jauh	3,59
	Tidak ada pemberi bantuan modal	40,20
	Tidak berminat	32,10
	Lainnya	1,04
	Mendapat tambahan modal	4,68

Sumber : ST2013-STU.S

Terkait dengan kelembagaan pertanian, sebagian besar RTU peternakan babi tidak memiliki akses terhadap kelembagaan tersebut. Data ST2013 menunjukkan hanya 15,15 persen RTU babi yang menjadi anggota koperasi (Tabel 4.4). Alasan sebagian besar RTU tidak menjadi anggota koperasi karena belum ada koperasi di wilayah desanya, yang mencapai 62,49 persen dari RTU sapi potong. Demikian pula dengan keanggotaan kelompok ternak, hanya 4,02 persen RTU babi yang menjadi anggota kelompok ternak. Alasannya adalah tidak terdapat kelompok ternak di wilayahnya dengan persentase 64,47 persen. Sedangkan 30,07 persen RTU babi menyatakan tidak berminat.

Tabel 4.4 Persentase RTU Babi Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014

Kelembagaan	Persentase (%)
(1)	(2)
Keanggotaan koperasi	15,15
Keanggotaan kelompok ternak	4,02
Penyuluhan	3,17
Menjadi mitra usaha	0,06

Sumber : ST2013-STU.S

Dengan minimnya keanggotaan kelompok ternak maka RTU babi juga minim mendapatkan penyuluhan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Terlihat dari persentase RTU babi yang mendapat penyuluhan hanya 3,17 persen (Tabel 4.4). Alasan tidak mendapatkan penyuluhan karena tidak ada penyuluhan di wilayah desanya. Kegiatan penyuluhan ini sangat fundamental bagi pengelolaan usaha ternak babi karena peternak akan mendapatkan ilmu untuk berinovasi dalam pengelolaan usaha ternaknya. Hal ini harus menjadi perhatian yang besar bagi pemerintah, jika ingin meningkatkan produktivitas usaha babi maka harus dibuka seluas—luasnya akses pada kelembagaan.

Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha pertanian adalah melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan besar atau BUMN/ BUMD. Manfaat bermitra bagi RTU adalah meningkatkan usahanya dengan tujuan komersial dan yang berorientasi pasar, dengan memanfaatkan kepedulian dari pihak swasta/BUMN. Perusahaan akan membantu menanggulangi kendala—kendala usaha yang ada. Namun sepertinya usaha kemitraan ini belum dilakukan sepenuhnya oleh RTU babi. Hanya kurang dari 1 persen RTU babi yang bermitra dengan perusahaan/BUMN, 0,06 persen RTU Babi yang bermitra tersebut semuanya hanya bermitra kepada BUMD (Tabel 4.4).



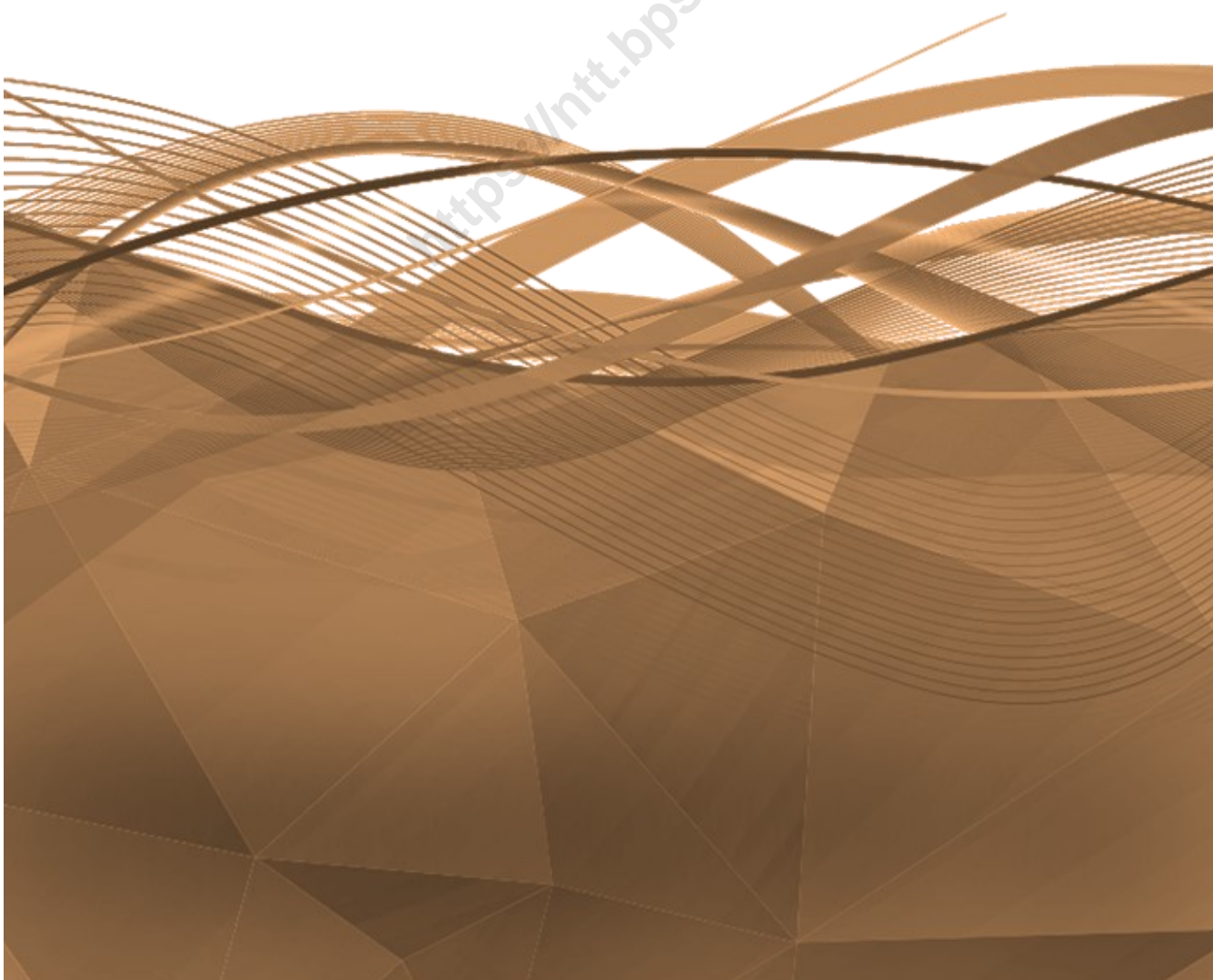
PROFIL
RUMAH TANGGA USAHA
PETERNAKAN
KAMBING



Bab

5

<http://ntt.bps.go.id>



PROFIL RUMAH TANGGA USAHA PETERNAKAN KAMBING

Di NTT, kambing telah lama dipelihara, akan tetapi peranan dan kambing sampai saat ini belum banyak berarti, baik sebagai sumber daging maupun sumber air susu. Hal ini terjadi karena usaha peternakan kambing masih sederhana dengan skala kecil. Sebenarnya ternak kambing mempunyai potensi dan prospek yang cukup besar untuk berkembang, karena termasuk ternak yang mempunyai adaptasi cukup mudah, dan juga modal yang diperlukan relatif kecil.

Dalam perkembangan peternakan, kambing memiliki berbagai kegunaan dan keunggulan yang beragam diantaranya : kambing memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan (termasuk pakan yang kurang baik) sehingga kambing disukai untuk dipelihara oleh para petani; kambing menyukai hidup berkelompok (berkoloni) sehingga memudahkan dalam pengawasan; kambing betina memiliki kemampuan reproduksi yang relatif tinggi, keistimewaan kambing di Indonesia adalah memiliki kecenderungan beranak kembar, yakni 2—5 ekor per kelahiran; produk utama berupa daging yang mengandung nilai gizi tinggi; produk sampingan berupa kulit, bulu, tulang, kotoran ternak dan lain—lain bisa digunakan sebagai bahan baku industri; kebutuhan hijauan relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan sapi. Sampai dengan saat ini di NTT, skala RTU peternakan kambing sebagian besar tergolong kecil, kedepannya diharapkan skala usaha peternakan kambing akan meningkat ke skala besar.

Penyebaran RTU Peternakan Kambing di NTT

Usaha rumah tangga kambing tersebar secara merata di kabupaten/ kota di NTT, Kabupaten Sikka merupakan kabupaten yang memiliki RTU Kambing terbesar di NTT, disusul Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Flores Timur (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Jumlah RTU Kambing Menurut Kabupaten/ Kota dan Skala Ternak, 2014

	Kabupaten/ Kota	Skala Kecil	Skala Sedang	Skala Besar	Jumlah
01	Sumba Barat	52	61	0	113
02	Sumba Timur	947	1,432	70	2,449
03	Kupang	172	276	119	567
04	Timor Tengah Selatan	867	748	0	1,615
05	Timor Tengah Utara	35	679	99	813
06	Belu	99	175	126	400
07	Alor	2,505	1,242	0	3,747
08	Lembata	1,123	1,277	120	2,520
09	Flores Timur	2,056	1,669	93	3,818
10	Sikka	2,840	2,315	48	5,203
11	Ende	758	180	0	938
12	Ngada	226	331	62	619
13	Manggarai	688	194	0	882
14	Rote Ndao	428	436	199	1,063
15	Manggarai Barat	591	261	37	889
16	Sumba Tengah	159	38	0	197
17	Sumba Barat Daya	591	135	0	726
18	Nagekeo	552	277	26	855
19	Manggarai Timur	2,280	2,629	0	4,909
20	Sabu Raijua	326	1,743	589	2,658
71	Kota Kupang	38	23	0	61
NUSA TENGGARA TIMUR		17,333	16,121	1,588	35,042

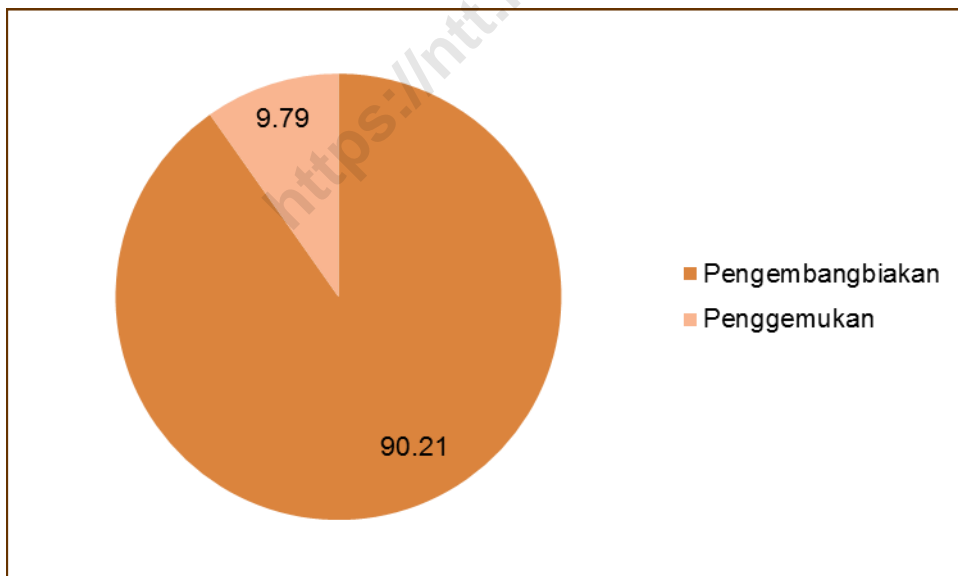
Sumber : ST2013-L,BPS

Wilayah yang memiliki jumlah RTU Kambing terendah berada di Kota Kupang, kemudian disusul Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Belu. Berdasarkan skala usaha yang dimiliki, RTU Kambing di NTT terbanyak berada di skala kecil (1-2 ekor) yaitu sebesar 17.333 RTU Kambing, untuk skala sedang (3-9 ekor) hanya sebesar 16.121 RTU Kambing, dan untuk skala besar (>10 ekor) sebesar 1.588 RTU Kambing.

Tujuan Utama Pengusahaan Ternak Kambing

Usaha peternakan babi pada umumnya merupakan usaha dengan tujuan utama melakukan pengembangbiakan kambing dengan memperbanyak anakan. Persentase usaha ini mencapai 90,21 persen. Sementara usaha RTU dengan tujuan penggemukan, yaitu hanya membeli bakalan kambing kemudian melakukan budidaya tanpa melakukan pengembangbiakan hanya 9,79 persen. Usaha pengembangbiakan kambing dianggap lebih menguntungkan karena persentasenya paling besar. Sementara itu tidak terdapat RTU kambing yang tujuan utamanya pembibitan (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Tujuan Pembudidayaan, 2014

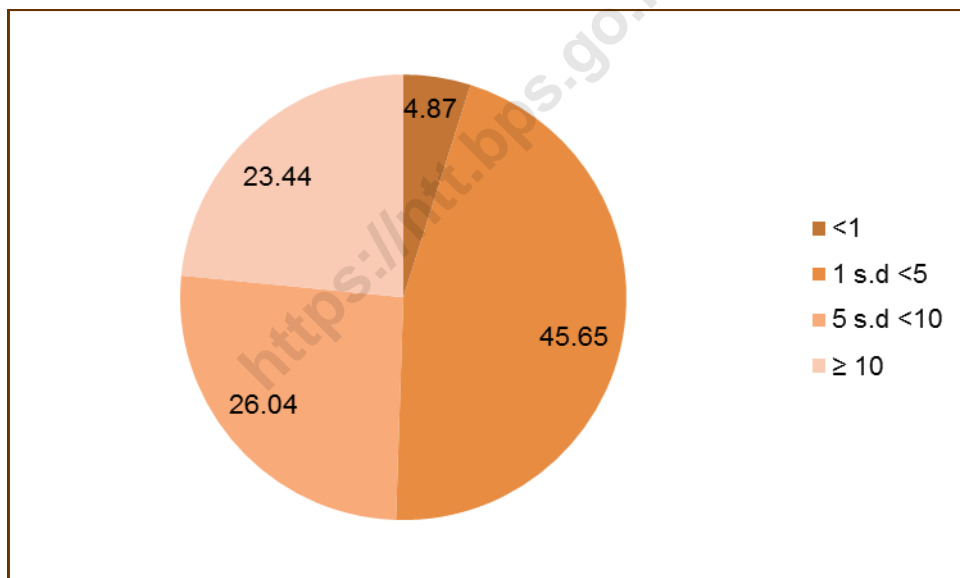


Sumber : ST2013-STU.S

Lama Kegiatan Usaha Peternakan Kambing

Sebagian besar usaha rumah tangga peternakan Kambing di NTT dilakukan dalam skala kecil dan rentang waktu 1 s.d < 5 tahun. Pada saat ini, rata—rata lama usaha peternakan kambing di bawah 5 tahun, dengan persentase RTU lebih dari 50 persen. Sedangkan yang sudah melakukan usaha lebih dari 10 tahun mencapai 23,44 persen (Gambar 5.2). Rentang pemeliharaan kambing tidak memakan waktu lama sama halnya dengan babi, karena siklus reproduksi kambing yang terbilang juga pendek memungkinkan pertumbuhan kambing menjadi cepat, sehingga banyak RTU Peternakan yang memilih beternak kambing untuk periode singkat. Hal ini menunjukkan cukup berminatnya rumah tangga baru untuk mengusahakan peternakan kambing.

Gambar 5.2 Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Lamanya Berusaha, 2014

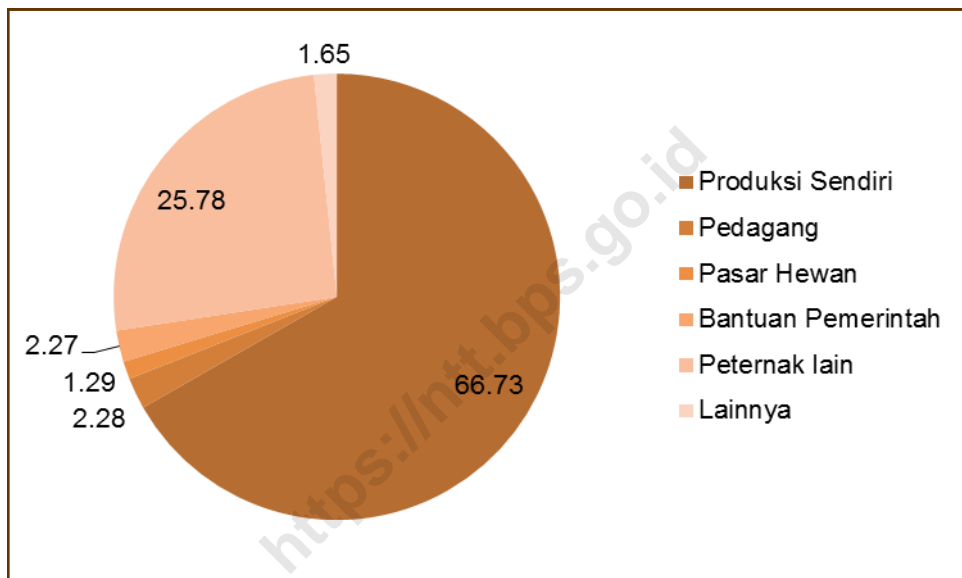


Sumber : ST2013-STU.S

Asal Ternak Kambing

Dalam rangka pengembangan usaha ternak kambing, RTU peternakan kambing umumnya akan melakukan penambahan ternak, baik dari pengembangbiakan sendiri maupun dari pembelian. Data ST2013 menunjukkan bahwa RTU kambing lebih banyak yang melakukan produksi sendiri (66,73 persen) dibandingkan yang melakukan pembelian ternak dari pedagang kambing (2,28 persen).

Gambar 5.3 Persentase RTU Peternakan Kambing Menurut Asal Ternak, 2014



Sumber : ST2013-STU.S

Pada gambar 5.3 juga menunjukkan jumlah RTU yang mendapat bantuan dari pemerintah dalam pengadaan kambing jumlahnya kecil, hanya sebesar 2,27 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa petani kambing di NTT sudah mempunyai kemandirian dalam pengembangbiakan usahanya. Namun demikian, bagi peternak skala kecil, diharapkan lebih banyak dukungan dari pemerintah, khususnya dalam pengadaan kambing.

Struktur Ongkos dan Produksi

Dalam satu tahun, pengeluaran untuk mengusahakan 1 ekor kambing sebesar 571 ribu rupiah. Namun, secara riil biaya yang dikeluarkan peternak hanya sekitar 8 ribu rupiah. Dalam pengelolaan usaha kambing banyak biaya produksi yang secara riil tidak dikeluarkan oleh petani antara lain pakan dan tenaga kerja. Pengeluaran terbesar digunakan untuk pakan yang mencapai 69,33 persen yaitu sebesar 396 ribu rupiah, tetapi secara riil biaya untuk penggunaan pakan tidak ada, hal ini bisa terjadi karena rumput sebagai makan utama kambing tidak diperjualbelikan seperti halnya jenis pakan lain. Biaya produksi yang cukup tinggi berikutnya adalah biaya tenaga kerja yaitu 143 ribu rupiah, namun karena banyak menggunakan pekerja keluarga maka biaya riil untuk penggunaan tenaga kerja juga tidak ada atau sama dengan 0 rupiah (Tabel 5.2).

Dari Tabel 5.2, nilai produksi perekor pertahun usaha ternak kambing mencapai 410 ribu rupiah. Jika dinilai dengan biaya produksi imputasi sebesar 571 ribu rupiah per ekor/tahun, maka peternak adalah tidak mendapatkan keuntungan.

Tabel 5.2 Struktur Ongkos Usaha Rumah Tangga Peternakan Kambing Per Ekor/Tahun, 2014

Keterangan	Seharusnya		Riil	
	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)	Nilai (Rp. 000)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran	571,52	100	8,02	100
Upah Tenaga Kerja	143,20	25,06	0,00	0,00
Pakan	396,24	69,33	0,00	0,00
Bahan Bakar	1,21	0,21	1,21	15,11
Listrik	0,00	0,00	0,00	0,04
Air	5,27	0,92	0,21	2,58
Pemeliharaan	1,09	0,19	1,02	12,70
Lain—Lain	24,51	4,29	5,58	69,57
Produksi	410,05			

Sumber : ST2013-STU.S

Akses Sumber Daya Produktif

Dari hasil ST2013, sebagian besar RTU peternakan kambing mengaku tidak mendapatkan tambahan modal, yaitu mencapai 98,26 persen. Hanya 1,74 persen saja yang mendapatkan tambahan modal. Alasan RTU kambing tidak menambah modal beragam. Alasan yang cukup banyak dikemukakan oleh peternak adalah tidak berminat dan tidak ada pemberi bantuan modal (Tabel 5.3).

Tabel 5.3 Persentase RTU Kambing Menurut Perolehan Tambahan Modal, 2014

	Uraian	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
	Tidak mendapatkan tambahan modal	98,26
	Tidak mampu membayar bunga	16,31
	Tidak memiliki agunan	9,19
	Lokasi Bank/ Koperasi terlalu jauh	7,41
	Tidak ada pemberi bantuan modal	32,26
	Tidak berminat	33,85
	Lainnya	0,97
	Mendapat tambahan modal	1,74

Sumber : ST2013-STU.S

Terkait dengan kelembagaan pertanian, sebagian besar RTU peternakan kambing tidak memiliki akses terhadap kelembagaan tersebut. Data ST2013 menunjukkan hanya 10,84 persen RTU kambing yang menjadi anggota koperasi (Tabel 5.4). Alasan sebagian besar RTU tidak menjadi anggota koperasi karena belum ada koperasi di wilayah desanya, yang mencapai 58,55 persen dari RTU kambing. Demikian pula dengan keanggotaan kelompok ternak, hanya 2,40 persen RTU kambing yang menjadi anggota kelompok ternak. Alasannya adalah tidak terdapat kelompok ternak di wilayahnya dengan persentase 64,13 persen. Sedangkan 30,62 persen RTU kambing menyatakan tidak berminat.

Tabel 5.4 Persentase RTU Kambing Menurut Akses Terhadap Kelembagaan, 2014

Kelembagaan	Persentase (%)
(1)	(2)
Keanggotaan koperasi	10,84
Keanggotaan kelompok ternak	2,40
Penyuluhan	3,20
Menjadi mitra usaha	0,00

Sumber : ST2013-STU.S

Dengan minimnya keanggotaan kelompok ternak maka RTU kambing juga minim mendapatkan penyuluhan dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Terlihat dari persentase RTU kambing yang mendapat penyuluhan hanya 3,20 persen (Tabel 5.4). Alasan tidak mendapatkan penyuluhan karena tidak ada penyuluhan di wilayah desanya. Kegiatan penyuluhan ini sangat fundamental bagi pengelolaan usaha ternak kambing karena peternak akan mendapatkan ilmu untuk berinovasi dalam pengelolaan usaha ternaknya. Hal ini harus menjadi perhatian yang besar bagi Pemerintah, jika ingin meningkatkan produktivitas usaha kambing maka harus dibuka seluas—luasnya akses pada kelembagaan.

Salah satu upaya untuk mengembangkan usaha pertanian adalah melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan besar atau BUMN/ BUMD. Manfaat bermitra bagi RTU adalah meningkatkan usahanya dengan tujuan komersial dan yang berorientasi pasar, dengan memanfaatkan kepedulian dari pihak swasta/BUMN. Perusahaan akan membantu menanggulangi kendala—kendala usaha yang ada. Namun sepertinya usaha kemitraan ini belum dilakukan sepenuhnya oleh RTU kambing. Tidak terdapat RTU kambing yang bermitra dengan perusahaan/BUMN, (Tabel 5.4).

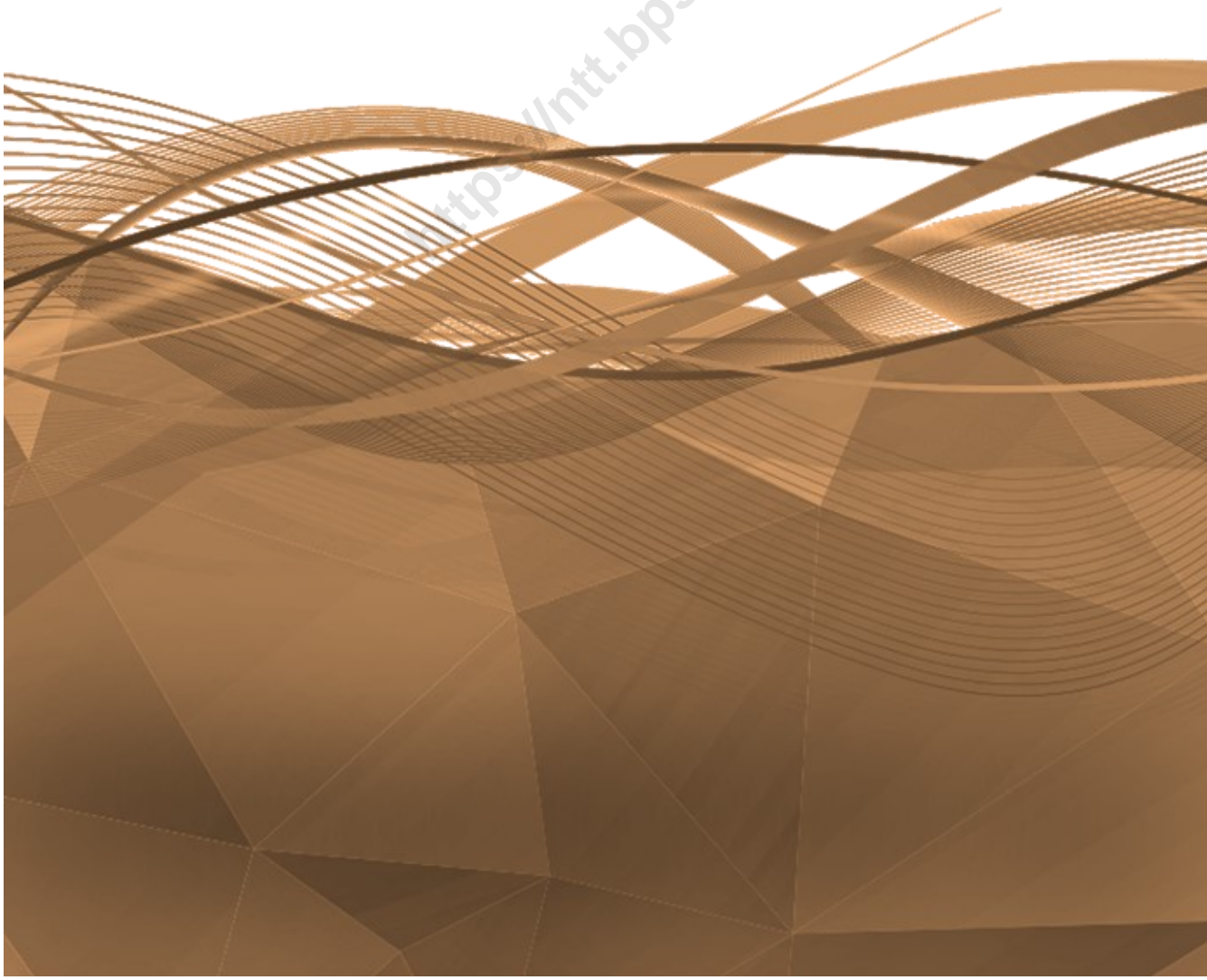


KESIMPULAN

Bab

6

<http://ntt.bps.go.id>



KESIMPULAN

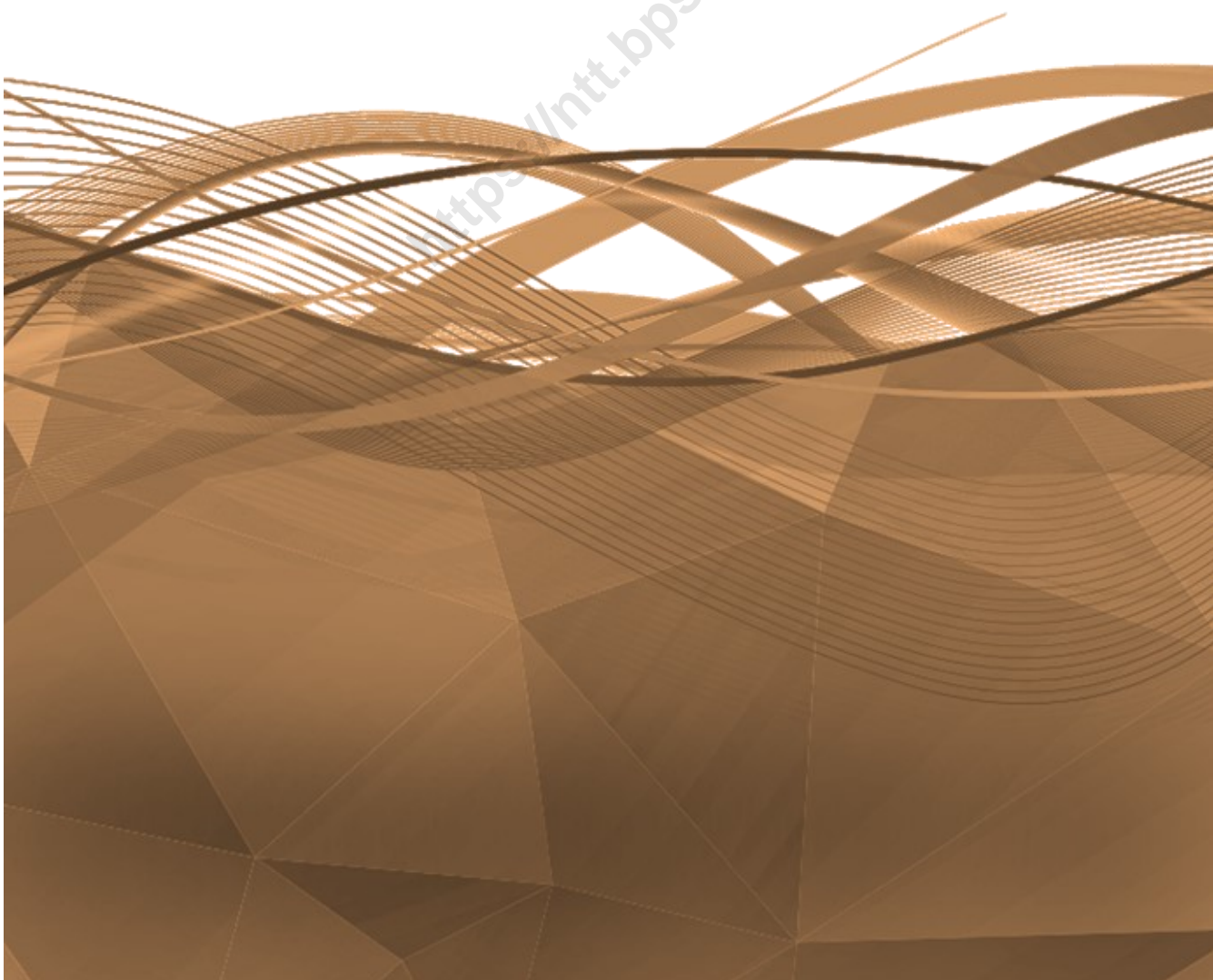
1. Dalam perkembangan selama 10 tahun terakhir, subsektor peternakan memberikan tren perkembangan kontribusi yang berfluktuasi. Namun, secara umum meningkat lebih baik dibandingkan sektor Pertanian yang secara keseluruhan cenderung menurun.
2. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir produksi komoditas peternakan NTT terus meningkat. Namun, beberapa komoditas belum mampu memenuhi konsumsi dalam provinsi seperti daging sapi dan susu. Di NTT tidak terdapat RTU peternakan Sapi Perah, sehingga kebutuhan masyarakat NTT akan komoditi susu sapi juga tidak dapat terpenuhi. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini, persentase impor kedua komoditi tersebut masih tinggi, sehingga pemerintah hendaknya menjadikan kedua komoditi ini, daging sapi dan susu menjadi target swasembada pangan.
3. Jumlah RTU peternakan mengalami peningkatan, yaitu mencapai 13,84 persen.
4. Skala usaha RTU peternakan pada umumnya tergolong kecil, seperti usaha peternakan babi dan kambing. Namun demikian, RTU Peternakan sapi potong sebagian besar tergolong skala sedang.
5. Sebaran rumah tangga peternakan masih terpusat di Pualu Timor pada hampir semua jenis ternak unggulan NTT. Wilayah luar Pulau Timor, seperti Pulau Sumba dan Pulau Flores juga merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan 3 komoditi unggulan peternakan tersebut.

6. Lama kegiatan usaha peternakan oleh RTUP tergolong sedang, yaitu rata—rata pada kisaran 1 s/d 5 tahun. Sementara usaha baru yang tercermin dari lama kegiatan kurang dari satu tahun masih sangat kecil. Untuk ternak sapi potong persentasenya sekitar hampir 4 persen, untuk babi persentasenya 7 persen, sementara untuk babi hampir 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penambahan usaha baru dalam 1 tahun terakhir pada babi terbesar diantara ketiga jenis ternak tersebut.
7. Saat ini salah satu saran yang mendukung produktivitas usaha rumah tangga peternakan adalah akses terhadap sumber daya permodalan. Akses RTU Peternakan terhadap sumber permodalan masih kecil, khususnya untuk ketiga komoditi unggulan, untuk usaha sapi dengan persentase RTUP sebesar hampir 7 persen. Hal sama juga terjadi pada dua komoditi unggulan lain, untuk RTUP babi hanya 5 persen RTU yang mendapatkan modal tambahan, dan 2 persen untuk RTU kambing. Alasan RTUP yang tidak mendapat tambahan modal sebagian besar karena RTUP tidak berminat. Hal ini mengindikasikan RTU Peternakan tidak berencana untuk melakukan pengembangan usaha. Indikasi lain adalah proses yang berbelit—belit dalam memperoleh tambahan modal sehingga RTUP tidak berminat
8. Dalam kegiatan usaha peternakan, banyak biaya faktor produksi yang tidak dikeluarkan oleh RTUP antara lain pakan dan tenaga kerja untuk ketiga komoditi tersebut. Hal ini diindikasikan karena faktor pakan yang mudah didapatkan seperti rumput sehingga tidak memerlukan pembiayaan, untuk faktor tenaga kerja, banyak RTUP yang menggunakan pekerja keluarga.
9. Dari struktur ongkos usaha peternakan, persentase paling besar RTUP sapi potong dan kambing secara riil digunakan untuk pengeluaran lain—lain yaitu sebesar masing—masing 37 persen untuk sapi potong dan 70 persen untuk kambing, sementara untuk RTUP babi pengeluaran secara riil terbesar digunakan untuk pakan yaitu sebesar 66 persen.
10. Selain akses terhadap sumber daya modal, keanggotaan koperasi dan kelompok peternak juga sangat penting. Hasil ST2013 menunjukkan bahwa hanya 13 persen RTU sapi potong yang menjadi anggota koperasi, untuk RTU babi dan kambing juga relatif kecil masing—masing sebesar 15 persen dan 11 persen.

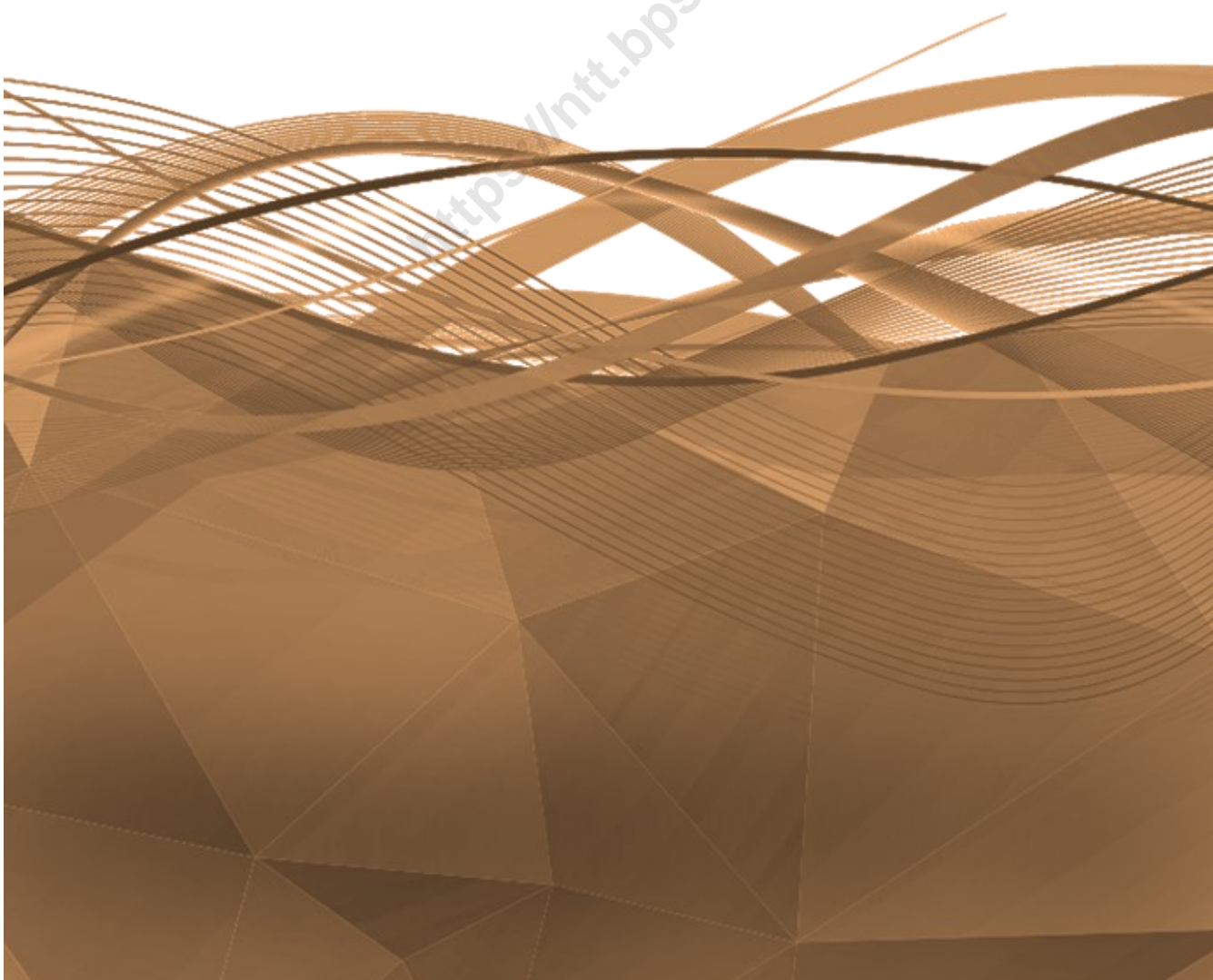
11. Dibandingkan RTU babi dan kambing, RTU sapi potong paling banyak mendapatkan bimbingan dan penyuluhan. Persentase RTU sapi potong yang mendapat bimbingan dan penyuluhan mencapai hampir 13 persen, sementara babi sebesar 3,17 persen dan kambing 3,20 persen.
12. Bentuk kemitraan dengan perusahaan atau BUMN/BUMD paling banyak dilakukan oleh RTU sapi potong yaitu sebesar 0,46 persen. Jumlah RTU ketiga komoditi yang menjalin kemitraan dengan perusahaan atau BUMN/BUMD jumlahnya tidak lebih dari satu persen. Sementara, tidak terdapat RTU kambing yang menjalin kerjasama/ kemitraan.
13. Kelayakan Usaha RTU sapi potong yang tercermin dari nilai RC Rasionya,. RC Rasio sapi potong sebesar 5,71, dimana ini berarti nilai produksi usaha lebih dari 5 kali lipat dari biaya produksinya selama setahun. Angka RC Rasio usaha sapi potong yang cukup besar tidak semata—mata menunjukkan keuntungan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi usaha sapi potong akibat tidak dikeluarkannya biaya pakan dan tenaga kerja untuk sebagian besar usaha sapi potong.

LAMPIRAN

<http://ntt.bps.go.id>



<http://ntt.bps.go.id>



Lampiran 1.1 Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2003 dan 2013

	Kabupaten/ Kota	2003	2013
01	Sumba Barat	12 171	14 046
02	Sumba Timur	28 759	32 845
03	Kupang	38 923	46 267
04	Timor Tengah Selatan	77 417	87 130
05	Timor Tengah Utara	29 470	41 262
06	Belu	46 292	47 974
07	Alor	19 501	21 787
08	Lembata	11 876	10 322
09	Flores Timur	27 439	26 611
10	Sikka	25 675	31 048
11	Ende	31 186	24 484
12	Ngada	16 631	21 521
13	Manggarai	30 852	31 631
14	Rote Ndao	14 535	16 001
15	Manggarai Barat	25 900	29 083
16	Sumba Tengah	8 160	9 592
17	Sumba Barat Daya	24 903	32 130
18	Nagekeo	16 353	21 715
19	Manggarai Timur	32 486	37 133
20	Sabu Raijua	5 871	12 460
71	Kota Kupang	3 411	5 823
NUSA TENGGARA TIMUR		527 811	600 865

Lampiran 1.2 Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Kabupaten/ Kota dan Beberapa Jenis Ternak, 2013

Kabupaten/ Kota	Sapi Potong	Kerbau	Babi	Kambing	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Itik
01 Sumba Barat	59	1 287	10 350	113	4 175	2	6	0
02 Sumba Timur	9 227	6 628	18 309	2,449	5 024	0	0	0
03 Kupang	26 232	113	7 727	567	6 297	0	224	0
04 Timor Tengah Selatan	44 274	0	30 457	1,615	12 209	0	65	0
05 Timor Tengah Utara	24 702	0	9 701	813	1 354	0	41	0
06 Belu	24 727	75	10 159	400	3 892	0	0	65
07 Alor	126	35	11 929	3,747	4 377	2	28	95
08 Lembata	1 640	0	3 533	2,520	3 911	0	46	0
09 Flores Timur	669	0	21 971	3,818	10 035	0	128	0
10 Sikka	5 210	232	20 174	5,203	6 104	0	0	0
11 Ende	10 378	654	8 555	938	1 427	0	36	0
12 Ngada	8 898	1 049	10 698	619	2 397	0	6	0
13 Manggarai	6 966	1 894	14 684	882	2 238	0	448	97
14 Rote Ndao	6 686	1 379	4 598	1,063	795	0	21	1
15 Manggarai Barat	2 810	6 734	12 556	889	4 096	0	134	0
16 Sumba Tengah	478	919	4 096	197	2 181	0	30	0
17 Sumba Barat Daya	358	2 198	21 057	726	6 757	0	0	0
18 Nagekeo	6 998	2 182	9 056	855	1 940	0	0	105
19 Manggarai Timur	4 625	2 884	22 190	4,909	5 052	0	185	0
20 Sabu Raijua	892	1 469	6 498	2,658	2 009	0	2	0
71 Kota Kupang	1 443	0	3 751	61	40	0	294	0
NUSA TENGGARA TIMUR	187 398	29 732	262 049	35,042	86 310	4	1 694	363

Lampiran 1.3 Persentase Peternak Menurut Jenis Ternak dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Jenis Ternak	Pendidikan Terakhir Peternak Utama					Jumlah
	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Perguruan Tinggi	
Sapi Potong	50 409	71 257	17 771	21 737	5 841	167 015
Kerbau	9 331	14 181	3 256	2 159	805	29 732
Babi	67 566	75 629	22 758	22 710	8 484	197 147
Kambing	9 234	15 126	2 697	2 984	670	30 711
Ayam Kampung	22 165	22 019	9 561	6 797	1 699	62 241
Ayam Ras Pedaging	23	636	155	437	250	1 501
Ayam Ras Petelur	0	0	0	2	0	2
Itik	0	167	65	1	28	261

Lampiran 1.4 Persentase Peternak Menurut Jenis Ternak dan Kelompok Umur Peternak, 2014

Jenis Ternak	Kelompok Umur					Jumlah
	< 25 Tahun	25-34 Tahun	35-44 Tahun	45-44 Tahun	55 Tahun Keatas	
Sapi Potong	1.13	8.54	22.35	32.88	35.09	100.00
Kerbau	1.01	8.22	21.94	29.88	38.95	100.00
Babi	1.04	14.67	25.62	29.45	29.22	100.00
Kambing	1.14	16.95	23.45	28.88	29.58	100.00
Ayam Kampung	2.14	14.02	26.01	29.13	28.71	100.00
Ayam Ras Pedaging	0.18	6.14	27.80	40.32	25.56	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00
Itik	0.00	0.00	35.81	37.47	26.72	100.00

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran 1.5 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Lama Kegiatan Usaha, 2014

Jenis Ternak	Lama Kegiatan Usaha				Jumlah
	< 1 Tahun	1 s.d < 5 Tahun	5 s.d < 10 Tahun	≥ 10 Tahun	
Sapi Potong	3.72	34.91	25.70	35.67	100.00
Kerbau	2.27	30.43	25.76	41.54	100.00
Babi	7.03	52.29	18.32	22.37	100.00
Kambing	4.87	45.65	26.04	23.44	100.00
Ayam Kampung	6.57	49.69	19.00	24.74	100.00
Ayam Ras Pedaging	7.08	71.31	12.57	9.03	100.00
Ayam Ras Petelur	0	100	0	0	100
Itik	0.00	82.64	7.71	9.64	100.00

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran 1.6 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, dan Asal Utama Ternak, 2014

Jenis Ternak	Lama Kegiatan Usaha						Jumlah
	Produksi Sendiri	Pedagang di Luar Pasar Hewan	Pedagang di Pasar Hewan	Bantuan Pemerintah	Peternak Lain	Lainnya	
Sapi Potong	59.85	2.43	4.49	5.94	26.16	1.12	100.00
Kerbau	66.01	4.94	1.39	2.12	20.16	5.38	100.00
Babi	44.77	7.25	6.79	1.19	38.39	1.61	100.00
Kambing	66.73	2.28	1.29	2.27	25.78	1.65	100.00
Ayam Kampung	67.47	3.47	5.07	0.00	22.35	1.64	100.00
Ayam Ras Pedaging	0.00	74.09	2.13	0.00	23.79	0.00	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Itik	92.01	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	100.00

Lampiran 1.7 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Perolehan Tambahan Modal, dan Sumber Modal, 2014

Jenis Ternak	Sumber Tambahn Modal					Tidak Mendapat Modal	Jumlah
	Bank/KUR/PUAP	PNPM	Koperasi/Kelompok	Perorangan	Lainnya		
Sapi Potong	0.88	0.57	2.05	2.26	1.13	93.21	100.00
Kerbau	0.74	0.19	0.17	0.32	0.33	98.26	100.00
Babi	0.31	0.57	1.33	1.39	1.12	95.32	100.00
Kambing	0.24	0.05	0.85	0.25	0.34	98.26	100.00
Ayam Kampung	0.32	0.35	0.43	0.24	0.15	98.52	100.00
Ayam Ras Pedaging	5.90	3.25	2.54	0.18	3.78	84.36	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Itik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

<https://ntt.bps.go.id>

Lampiran 1.8 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Status Keanggotaan Koperasi, dan Alasan Tidak Menjadi Anggota Koperasi, 2014

Jenis Ternak	Anggota Koperasi	Alasan Tidak Menjadi Anggota Koperasi					Jumlah
		Belum Ada Koperasi di Desa	Tidak Berminat	Pelayanan Koperasi Tidak Memuaskan	Proses Administrasi Sulit	Lainnya	
Sapi Potong	13.15	51.49	31.69	1.66	1.88	0.12	100.00
Kerbau	10.37	64.57	21.38	1.80	1.02	0.87	100.00
Babi	15.15	53.02	27.57	1.18	2.04	1.04	100.00
Kambing	10.84	52.21	30.77	3.46	1.48	1.25	100.00
Ayam Kampung	14.64	51.80	29.47	1.95	1.70	0.45	100.00
Ayam Ras Pedaging	35.12	13.40	49.53	0.00	1.95	0.00	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Itik	19.28	44.35	36.36	0.00	0.00	0.00	100.00

Lampiran 1.9 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak dan Status Keanggotaan Kelompok Peternak, 2014

Jenis Ternak	Anggota Kelompok Ternak	Alasan Tidak Menjadi Anggota Kelompok Ternak				Jumlah
		Belum Ada Kelompok Peternak di	Tidak Berminat	Pelayanan Kelompok Peternak Tidak Memuaskan	Lainnya	
Sapi Potong	13.41	42.17	38.85	4.43	1.14	100.00
Kerbau	4.66	70.73	19.97	4.40	0.23	100.00
Babi	4.02	61.88	28.86	4.34	0.90	100.00
Kambing	2.40	62.59	29.89	3.90	1.22	100.00
Ayam Kampung	2.30	70.25	24.14	2.21	1.09	100.00
Ayam Ras Pedaging	8.74	46.22	43.15	0.94	0.94	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Itik	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Lampiran 1.10 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak dan Keikutsertaan dalam Bimbingan Penyuluhan Usaha Peternakan, 2014

Jenis Ternak	Pernah Ikut	Tidak Pernah Ikut	Jumlah
Sapi Potong	12.50	87.50	100.00
Kerbau	4.10	95.90	100.00
Babi	3.17	96.83	100.00
Kambing	3.20	96.80	100.00
Ayam Kampung	1.64	98.36	100.00
Ayam Ras Pedaging	3.72	96.28	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	100.00	100.00
Itik	0.00	100.00	100.00

Lampiran 1.11 Persentase Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Beberapa Jenis Ternak, Kegiatan Kemitraan dengan Perusahaan, dan Jenis Badan Hukum Mitra Usaha Utama, 2014

Jenis Ternak	Jenis Badan Hukum Mitra Usaha Utama			Tidak Melakukan Kemitraan	Jumlah
	BUMN	BUMD	Swasta		
Sapi Potong	0.06	0.05	0.35	99.54	100.00
Kerbau	0.00	0.00	0.19	99.81	100.00
Babi	0.00	0.06	0.00	99.94	100.00
Kambing	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Ayam Kampung	0.00	0.00	0.15	99.85	100.00
Ayam Ras Pedaging	0.00	0.00	15.70	84.30	100.00
Ayam Ras Petelur	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Itik	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

<https://ntt.bps.go.id>

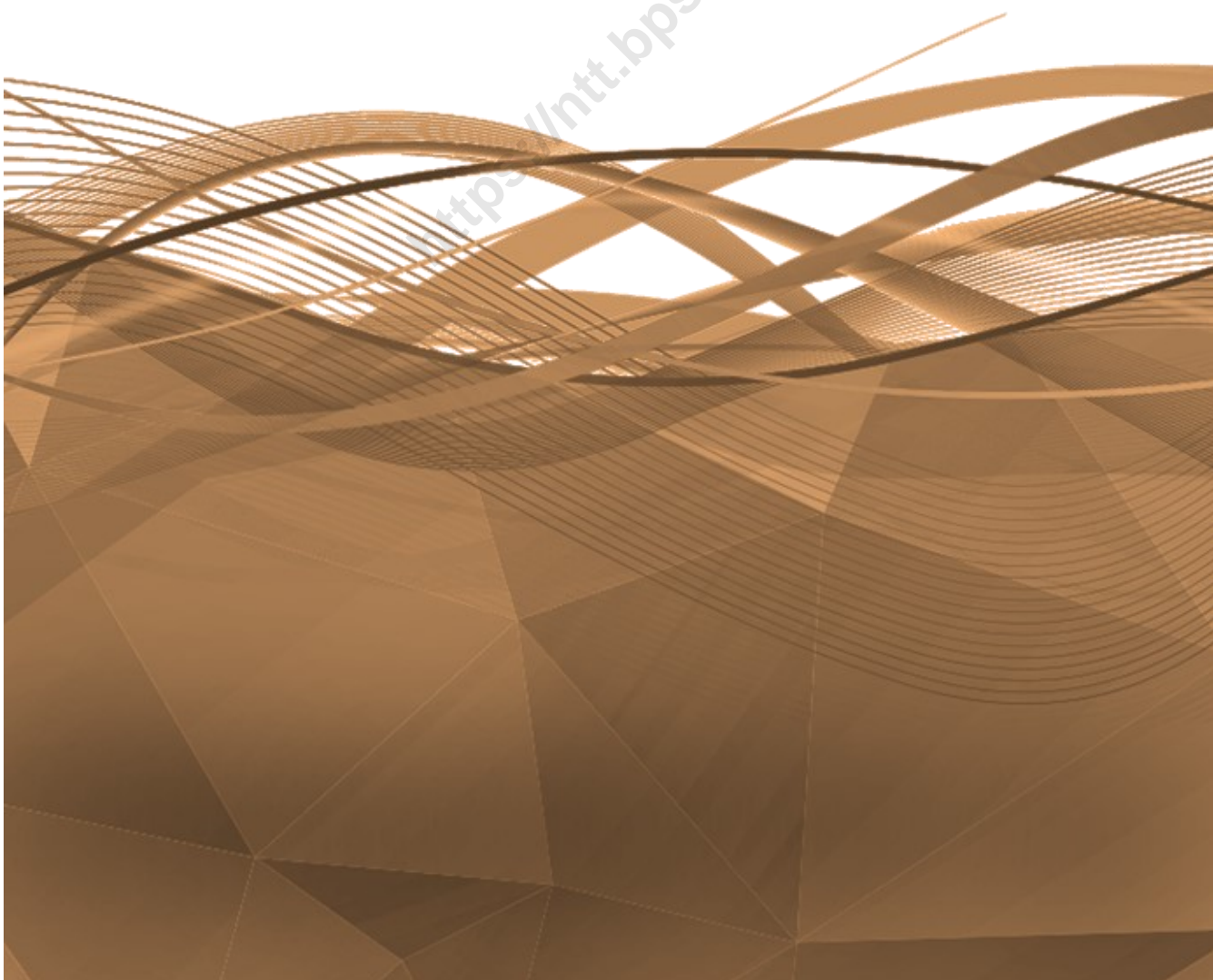


KONSEP DAN DEFINISI



<http://ntt.bps.go.id>

<http://ntt.bps.go.id>



Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, termasuk dalam hal ini adalah usaha jasa pertanian

Rumah tangga peternakan adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah.

Usaha peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk peternakan (melakukan pemeliharaan ternak/ unggas) dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko usaha

Pengembangbiakan ternak adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperbanyak anak.

Penggemukan ternak adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan meningkatkan bobot/ berat badan ternak dengan cara membeli bakalan/ anak ternak dan kemudian menjualnya bila sudah cukup umur.

Pembibitan ternak adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan memperoleh anakan, bakalan (ternak muda) yang mewarisi sifat—sifat unggul dengan cara—cara pemuliaan ternak (seleksi).

Pembesaran ternak betina (reraring) adalah usaha pemeliharaan/ pembesaran anak/ pedet sapi perah betina sampai menjadi dara bunting atau dara siap bunting untuk kemudian dijual dan anak ayam/ itik petelur sampai menjadi pullet (ayam ras/ itik petelur yang siap produksi).

Menghasilkan/ memproduksi susu atau telur adalah usaha pemeliharaan ternak dengan tujuan menghasilkan susu atau telur.

Upah pekerja atau upah buruh/ karyawan adalah semua pembayaran yang dikeluarkan baik berupa uang maupun barang untuk pekerjaan yang dibayar. Upah berupa barang dinilai berdasarkan harga setempat yang berlaku pada saat dibayarkan.

Pengeluaran pakan ternak adalah pengeluaran untuk pakan ternak yang benar—benar telah digunakan selama periode 1 Mei 2013 s.d 30 April 2014 sehingga untuk pakan yang telah dibeli tetapi belum digunakan tidak dimasukkan sebagai pengeluaran pakan.

<https://ntt.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jl. R. Suprpto No.5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755 - Fax. (0380) 833124

ISBN 978-602-6786-27-2

